

RINGKASAN DISERTASI

**MANAJEMEN ASET PUBLIK
STUDI PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO
DI KABUPATEN GORONTALO**

***PUBLIC ASSET MANAGEMENT
STUDY OF LIMBOTO LAKE MANAGEMENT
IN GORONTALO REGENCY***

TRISUSANTI LAMANGIDA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**

**MANAJEMEN ASET PUBLIK
STUDI PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO
DI KABUPATEN GORONTALO**

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Doktor

Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

Diajukan oleh

TRISUSANTI LAMANGIDA

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Manajemen Aset Publik Studi
Pengelolaan Danau
Limboto di Kabupaten Gorontalo

Nama : Trisusanti Lamangida

Nim : 15A05020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyetujui,

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si
Promotor

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si
Kopromotor

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si
NIP. 19650522 1999003 1 002

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hamsu Abd. Gani, M.Pd
NIP. 19601231198503 1 028

PRAKATA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat, anugrah dan hidayah serta ridho-Nya sehingga penyusunan dan penulisan disertasi yang berjudul “Manajemen Aset Publik Studi Pengelolaan Danau Limboto Kabupaten Gorontalo” dapat diselesaikan.

Proses penyelesaian disertasi ini merupakan suatu perjuangan panjang sebab selama proses penelitian tidak sedikit kendala yang ditemui. Namun berkat kesungguhan dan keseriusan promotor dan kopromotor dalam mengarahkan dan membimbing penulis sehingga akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si selaku promotor serta Bapak Prof. Dr. Jasruddin Daud Malago, M.Si selaku Ko Promotor yang selalu tulus memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Kepada tim penguji: Bapak Prof. Dr. H. Hamsu Abd Gani, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Rifdan, M.Si., dan Bapak Prof. Dr. Fakhri Kahar, M.Si., serta Bapak Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd., atas jasanya selaku penguji yang banyak memberikan masukan demi kesempurnaan disertasi ini. Ucapan terima kasihteristimewa kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd, selaku Bupati Kabupaten Gorontalo, semasa menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo memiliki andil besar bahkan turut mengantarkan penulis menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof. Dr. Husain, M.Pd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof. Dr. Hamsu Abd Gani, M.Si., para Asisten Direktur serta Ketua Program Studi Administrasi Publik, Bapak Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Bapak Dr. drMohammad Isman

Jusuf. Sp.S yang telah memberikan dukungan dan kebijakan yang luas kepada penulis selama dalam penyelesaian studi. Kepala Dinas terkait pengelolaan danau Limboto di Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Gorontalo, hingga Pemerintah Desa dan masyarakat pesisir danau Limboto khususnya di Desa Hutadaa Kabupaten Gorontalo, yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian

Civitas akademika Universitas Negeri Makassar khususnya rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015, mahasiswa Program *Sandwich Like-like Australia Melbourne*, yang senantiasa saling memotivasi untuk penyelesaian. Kepada Bapak Dr. Jans Nasila M.Si yang telah banyak membantu mahasiswa kelas Gorontalo selama mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Makassar, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga khusus kepada kedua orang tua tercinta; Rindu Lamangida (alm) dan Rasima Patila (almh), serta Mertua Asuh “Ani Suleman (alm), Mertua “Kadir Katili (alm) dan Rina Suleman (almh) berjasa telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang serta mewariskan ilmu kepada penulis. Kepada suami tercinta Saman Katili, SE, anak-anakku tersayang: Tressan Eka Putri S. Katili, dan Bintang Dwi Putra S. Katili, terima kasih atas pengorbanan kalian, dengan penuh ketabahan dan kesabaran, merelakan penulis mengikuti pendidikan di Kota Makassar hingga selesai melakukan penulisan disertasi ini. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu ikhlas membantu kekurangan penulis, teristimewa kakak “Rensi Lamangida, S.Pd, (almh) yang selalu merindukan dan mendoakan keberhasilan studi penulis dalam setiap detik waktunya, tetapi sayang tidak sempat menyaksikan momen ini. Ponakan semua tanpa terkecuali terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua.

Harapan penulis, semoga segala dukungan, dorongan dan bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan oleh berbagai pihak hingga selesainya penulisan disertasi ini dapat

menjadi nilai ibadah serta mendapatkan ridho dari Allah
SWT.Aamiin...

Makassar,
14 November 2018
Trisusanti Lamangida

RINGKASAN DISERTASI

MANAJEMEN ASET PUBLIK STUDI PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO DI KABUPATEN GORONTALO

PUBLIC ASSET MANAGEMENT STUDY OF LIMBOTO LAKE MANAGEMENT IN GORONTALO REGENCY*)

TRISUSANTI LAMANGIDA)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis peran aktor dan pola interaksi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan aset publik Danau Limboto. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan diskusi kelompok terfokus, studi literatur, dan pengamatan langsung peneliti selama di lapangan. Analisis data dilakukan mengikuti “model interaktif” dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aset publik danau Limboto didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen yang terukur dan komprehensif (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan koordinasi). Disamping itu, terlihat adanya upaya penguatan peran stakeholders atau aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang didasarkan pada pengembangan pola interaksi *Government to Government (G2G)*, *Government to Society (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, dan *Business to Society (B2C)*, dalam pengelolaan danau Limboto dengan metode pengelolaan yakni Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna/BGS/BSG. Manajemen (pengelolaan) aset publik ini merupakan wahana efektif untuk melakukan revolusi mental, membangun *public entrepreneurship*, dan mengubah pola pikir warga masyarakat yang bermukim dan terlibat pada program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan dalam pengelolaan danau Limboto diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan *Good Society Governance (GSG)*. Kebaruan penelitian ini terlihat pada konstruksi prototype model deskriptif pengelolaan aset publik danau Limboto melalui Sinergitas aktor (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi) yang terkoordinasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi dalam wadah/wahana strategis guna meningkatkan nilai tambah investasi daerah (NTID) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implikasi teoritisnya adalah meneguhkan pandangan David Osborne dan Ted Gaebler tentang *Reinventing Government* dan *Banishing Bureaucracy* yang menurut Haedar Akib menandai era baru reformasi atau transformasi organisasi modern saat ini. Implikasi praktisnya adalah sebagai kontribusi pemikiran baru kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam merevitalisasi tugas pokok, fungsi

dan peran aktor pada program pendampingan kelompok pemberdayaan masyarakat mandiri di pesisir danau (Kube Tunas Mandiri), sekaligus sebagai upaya nyata membangun kreativitas dan inovasi warga masyarakat pesisir danau menurut perspektif public entrepreneurship di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen asset publik, pemberdayaan masyarakat, public *entrepreneurship*.

ABSTRACT

This study aims to analyze and synthesize the role of actors and patterns of interaction between the Government, the private sector and the community in managing public assets of Limboto Lake. This type of research is qualitative with a case study approach. Data collection techniques use focus group discussions, literature studies, and direct observation of researchers in the field. Data analysis was carried out following an "interactive model" with the stages of data collection, data condensation, data presentation, verification/concluding. The results show that the governance of Lake Limboto's public assets is based on the application of measurable and comprehensive management principles (planning, budgeting, implementation and coordination). In addition, there is an effort to strengthen the role of stakeholders or actors, namely the government, the private sector and the community based on the development of patterns of interaction between Government to Government (G2G), Government to Society (G2C), Government to Business (G2B), and Business to Society (B2C) in the management of Limboto lake, with the build method for handover/build handover/BGS/BSG. This public asset management is an effective vehicle to carry out a mental revolution, build public entrepreneurship, and change the mindset of the people who live and are involved in community empowerment programs in the management of Limboto Lake. The involvement of the surrounding community through an empowerment program in the management of Limboto lake is directed as an effort to realize the Good Society Governance (GSG). The novelty of this research can be seen in the construction of a descriptive prototype model of managing Lake Limboto's public assets through the synergy of actors (Government, Private and Community and Higher Education) that are coordinated, synchronized and simplified in strategic vehicles to increase regional investment value added and Original Revenue Region (PAD). The theoretical implication is affirming the views of David Osborne and Ted Gaebler on Reinventing Government and Banishing Bureaucracy, which according to Haedar Akib marks the new era of reform or transformation of modern organizations today. The practical implications are as a contribution of new thoughts to the Gorontalo Regency government in revitalizing the main tasks, functions and roles of actors in the mentoring program of independent community empowerment groups in the coastal lakes (Kube Tunas Mandiri), as well as a tangible effort to build creativity and innovation of coastal lake residents according to perspective public entrepreneurship in Indonesia.

Keywords: *Public asset management, Community Empowerment, Public Entrepreneurship.*

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Perspektif Manajemen Aset Publik	5
B. Konsep New Publik Manajemen (NPM)	6
C. Manajemen Aset Publik Kalaboratif	9
D. Pengelolaan Sektor Publik	12
E. Kalaborasi Governance	17
F. Pemberdayaan Masyarakat	22
G. Kerangka Konseptual Penelitian	24
III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	26
C. Fokus dan Dekripsi Fokus	26
D. Instrumen Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan dan Keabsahan Data	27
F. Teknik Analisis Data Penelitian	28
IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	29
V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan	43

VI KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
C. Dalil-Dalil	48
D. Implikasi Hasil Penelitian	51
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Manajemen asset sering digunakan untuk mengelola asset-aset yang dimiliki oleh Negara. Secara etimologi manajemen mengandung arti pencapaian hasil dan tujuan, yang mencakup fungsi-fungsi luas antara lain, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, koordinasi, staffing, motivasi dan pembuatan keputusan (Mahmudi; 2015; 39). Namun Robbins dan David 2004 mengemukakan bahwa manajemen tidak lepas dari istilah proses, efektif dan efisien. Nemmer dalam sebuah penelitiannya berjudul *Aset Management Texas Style* (2007) berpendapat bahwa tujuan utama manajemen asset adalah meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana asset, sehingga pengembalian investasi terbaik asset dapat diperoleh kembali. Berbeda dengan konsep E.S. Savas telah di adopsi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (BMN/D). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 3 untuk pengelolaan barang milik Negara/Daerah (BMN/D) antara lain meliputi; infrastruktur bandar udara, terminal, pelabuhan laut, sungai dan atau danau dalam konteks penelitian ini adalah Danau Limboto.

Danau Limboto sebagai asset Daerah Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai penyedia air bersih, habitat tumbuhan dan satwa, pengatur fungsi hidrologi, pencegah bencana alam, stabilisasi sistem dan proses-proses alam, penghasil sumberdaya alam hayati, penghasil energi, sarana transportasi, rekreasi dan olahraga, sumber perikanan (baik budidaya maupun perikanan tangkap), dan pengendali banjir, serta sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Di samping itu Danau Limboto telah menjadi saksi sejarah berabad-abad lamanya dalam menghidupi masyarakat Gorontalo, disadari ataupun tidak sebagian besar dari penduduk pesisir danau menggantungkan hidupnya dari sumber air tawar ini, baik

sebagai nelayan, pembudidaya ikan, maupun sebagai pedagang ikan.

Konferensi Nasional Danau di Indonesia I pada 13 sampai 15 Agustus 2009 telah menghasilkan Kesepakatan Bali 2009 antara 9 Menteri Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan dalam Mengantisipasi perubahan iklim global. Kesepakatan Bali 2009 telah menetapkan 15 prioritas danau yang akan ditangani 2 sama secara terpadu berwawasan lingkungan dan kelanjutan periode 2010-2014. Penetapan Danau menjadi prioritas pada kerusakan, pemanfaatan, komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan danau serta fungsi strategis untuk kepentingan nasional dan salah satu diantaranya adalah Danau Limboto (Germadan: 2015: 1).

Pengelolaan aset Danau Limboto membutuhkan manajemen yang baik sebagai solusi/penanganan yang mendesak. Melalui perencanaan penetapan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat, serta penetapan rencana alternative pengelolaan danau Limboto. berbagai pihak telah memberikan perhatian besar melalui kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi berupa FGD oleh akademisi; Lokakarya berbagai institusi terkait di tingkat Propinsi; hingga penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Pemerintah Kota Gorontalo disaksikan Gubernur Provinsi Gorontalo dan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006, menyangkut 13 (tiga belas) point kegiatan yang disepakati sebagai upaya pemulihan lingkungan Danau Limboto, namun dianggap terlambat menindaklanjutinya. Demikian halnya Pemerintah Provinsi dalam menetapkan kebutuhan anggaran APBN 2012-2016 bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melibatkan SKPD Kabupaten Gorontalo (Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup namun Balai Wilayah Sungai (BWS II Sulawesi) dalam melaksanakan pembangunan tanggul, cekdam, pintu air, dan pengerukan kawasan danau Limboto belum bersinergidengan pemerintah dan masyarakat. Pengendalian penggunaan anggaran belum sepenuhnya untuk tindakan perbaikan Danau Limboto. Hal ini terjadi karena Perda No. 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan danau Limboto belum

dijadikan momentum dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan danau Limboto. Pelaksanaan pengelolaan danau masih bersifat parsial. Pendekatan *bioregionalism* yang diusulkan oleh Japesda Gorontalo (Dako, 2016) belum dijadikan referensi dalam pengelolaan danau Limboto. Lemahnya koordinasi aktor menjadi memicu timbulnya persoalan lain dalam pengelolaan danau Limboto. Belum adanya kesatuan komando, sinergitas dan kolaborasi dalam pencapaian tujuan penyelamatan danau Limboto, ditandai denganditerbitkannya sertifikat sebanyak 352 buah (Data BPN Kabupaten Gorontalo, 2016) menggambarkan lemahnya peran dan interaksi aktor dalam pencapaian tujuan pengelolaan danau Limboto.

Fenomena Danau Limboto yang bagaikan areal yang tak bertuan sehingga memungkinkan siapapun dapat melakukan kegiatan pengkaplingan area kawasan danau, demi kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok (pembuatan jaring apung), maupun berbagai usaha lainnya, Germadan Limboto (2015: 2). Proses pendangkalan yang terus menerus terjadidari waktu ke waktu tersebut, sudah tentu menimbulkan kekhawatiran akan nasib danau di masa depan. Apabila kecenderungan ini berjalan terus maka akan berdampak buruk bagi keberlanjutan danau di masa yang akan datang,

dikhawatirkan pada tahun 2025 danau ini diperkirakan akan berubah menjadi daratan. Germadani (2015: 20). Fenomena lainnya tanggal 26 oktober 2016, banjir melanda Kabupaten Gorontalo, sehingga mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd menetapkan Status darurat bencana bandang yang mengakibatkan ribuan rumah penduduk terendam banjir, dengan jumlah korban mencapai 15.000 jiwa. (Antara Foto/Adiwinata Solihin: 2/7/2017).

Menariknya sepanjang sejarah pendangkalan dan berbagai permasalahan perubahan fungsi danau Limboto namun belum ada riset yang memayungi masalah pengelolaan asset ini. Danau Limboto yang menyimpan sejuta potensi alam menjanjikan ini, disamping menjadi salah satu lokasi migran beranekaragaman hayati burung yakni berasal dari *afrika, Australia, eropa dan amerika* pada musim tertentu datang mengunjungi Danau Limboto. Danau ini juga menjadi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari 23 buah anak sungai yang mengalir terus ke laut. Merupakan potensi wisata alam daerah bernilai tinggi yang pantas untuk dipromosikan kepada dunia. Disisi lain Kabupaten Gorontalo selaku tuan rumah 70% wilayah danau berperan fungsi koordinasi saja. Regulasi UU no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (BMN/D) dalam pengelolaan Danau Limboto sebagai asset daerah belum sesuai harapan.

Political *action* Pemerintah Daerah dalam mengelola keunikan Danau Limboto masih dilihat dari kesempatan penganggaran saja. Semestinya jika pengelolaan Danau Limboto dilakukan dengan sinergitas aktor (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi) yang terkoordinasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi dalam wadah/wahana strategis maka akan berimplikasi pada perubahan pola mindsets masyarakat pesisir danau Limboto dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kajian penelitian manajemen asset public (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan koordinasi) inilah yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan. Maka alternative sebagai solusi pengelolaan Danau Limboto adalah melalui *Collaborative Governance* yang menitikberatkan pada

peran dan interaksi pemerintah, swasta dan masyarakat secara kolaboratif di daerah, adalah metode konvensional yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelamatan danau Limboto. Sugiama (2013) dan Siregar (2012), Nawawi (2003:52) manajemen aset adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien dan bernilai tinggi.

4 Berdasarkan aspek ontology yang ada, makaandang perlu untuk mengkaji proporsi ilmiah dengan judul *“Manajemen Aset Publik studi Pengelolaan Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Danau Limboto?
2. Bagaimana pola interaksi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Danau Limboto?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi dasar penetapan tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, mensintesis peran Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Danau Limboto
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mensintesis pola interaksi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Danau Limboto.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan, informasi yang diperoleh dari penelitian dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis:

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan akan menjadi bahan kajian secara ilmiah tentang manajemen aset publik Danau Limboto, sebagai upaya penyelamatan danau Limboto dan

dalam rangka mewujudkan *New Publik Management* di era otonomi daerah.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam rangka pengembangan konsep ilmu administrasi public yang aplikatif khususnya dalam pengelolaan asset public danau Limboto berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk memahami persoalan yang sama dalam proses pengelolaan asset danau Limboto.
2. Menjadi acuan atau referensi bagi mereka yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap kajian yang berhubungan dengan penyelamatan asset danau Limboto.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Manajemen Aset Publik

Manajemen mencakup istilah proses, efektif, dan efisien, sesuai dengan pendapat Robbins & David (2004) “*The term management refers to the process of getting things done, effectively and efficiently, through and with other people*”. Istilah proses dalam manajemen yang di maksud Robbins & David disini adalah langkah-langkah dan kegiatan utama yang dilakukan oleh seorang manajer. Selanjutnya istilah efisien dalam manajemen disini adalah melakukan pekerjaan dengan benar dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan istilah efisien dalam manajemen melakukan tugas dengan benar yang mana mengacu pada hubungan antara input dan output.

Siregar (2004) menjelaskan bahwa “Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu”. Ada dua jenis aset yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*). Menurut *British Standard Institution Publicly Available Specifications* (BSI PAS) 55:2008, manajemen aset adalah “*Systematic and coordinated activities and practices through which an organization optimally and sustainably manages its assets and asset systems, their associated performance, risks and expenditures over their life cycles for the purpose of achieving its organizational strategic plan.*” Yang mengatakan bahwa: manajemen aset adalah kegiatan dan praktis sistematis dan terkoordinasi dimana organisasi mengelola aset dan system aset secara optimal dan berkelanjutan, kinerja, resiko dan pengeluaran terkait mereka selama siklus hidup mereka untuk mencapai rencana strategis organisasionalnya

Prawoto mengemukakan bahwa “Manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, tehnik mesin dan praktek kerja yang diterapkan pada aset fisik

dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien”.

Organization for Economic Co-Operation and Development yang dikutip dalam sebuah proyek penelitian berjudul *Asset Management Texas Style* (2007) berpendapat bahwa manajemen aset didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mempertahankan, mengupgrade, dan mengoperasikan aset, menggabungkan prinsip rekayasa dengan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomi, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan fleksibel untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai harapan publik.

Nemmer dalam proyek penelitian berjudul *Asset Management Texas Style* (2007) berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan ini.

Manajemen yang melekat dengan perkembangan manajemen aset di Indonesia adalah manajemen konflik. Menurut Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. dan proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Manajemen aset adalah* kegiatan dan praktis sistematis dan terkoordinasi dimana organisasi mengelola aset dan system aset secara optimal dan berkelanjutan, kinerja, resiko dan pengeluaran terkait mereka selama siklus hidup aset untuk mencapai rencana strategis organisasinya

B. Konsep New Publik Manajemen (NPM)

Pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik seperti dalam pandangan yang dikemukakan oleh Denhardt

and Denhardt (2003:104), bahwa administrasi publik telah berfungsi sebagai “*the larger system of democratic governance*”, yang memunculkan pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dengan swasta dan masyarakat. Kooiman (1993) berpandangan, perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan seperti itu berawal dari konsep pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*) sebagai wujud interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai kontemporer yang demikian kompleks, dinamis, dan beraneka ragam. Konsep *governmnet* menurut Keban (2008), mengindikasikan pengertian dari sisi administrasi publik sebagai birokrasi klasik ala Weber dengan fokus “struktur organisasi dan fungsi” atau prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang merupakan lokusnya adalah pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human*”

development", (1999), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*". "Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat" (Dwiyanto, dkk, 2003:4).

Menurut Prasodjo (2007) paradigma itu telah dan sedang berlangsung di administrasi publik meliputi *classic public administration*, *new public management* dan *governance*. Teori *governance* menekankan pada "...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut" (Kooiman, 1993). *Good governance* dalam kesimpulan workshop yang diselenggarakan UNDP sebagai sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi *governance* memiliki suara dalam pengambilan keputusan (Dwiyanto, dkk, 2003:4). Oleh karena itu teori *governance* dan *good governance* relevan dengan manajemen publik baru (NPM) sebagai paradigma administrasi publik dalam pengelolaan sektor publik.

Osborne dan Plastrik (1999) menjelaskan, model NPM berfokus pada manajemen sektor publik berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma NPM menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender. Tuntutan tersebut berkaitan dengan isu penting reformasi Administrasi Negara yang mengkritisi pendekatan administrasi tradisional yang kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.

Reformasi administrasi yang melahirkan konsep *New Publik Management* (NPM) salah satunya menyangkut

manajemen pengelolaan sektor publik. Konsep NPM juga menurut Yuda (2016) memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik, karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembangpun juga terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini.

New Public Management (NPM) berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat kaitannya dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat terkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang *top-down*. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya (Yuda, 2016). Menurut prinsip-prinsip NPM adalah konsep payung yang menaungi serangkaian makna seperti desain organisasi dan manajemen, penerapan kelembagaan ekonomi atas manajemen publik, serta pola-pola kebijakan. Prinsip-prinsip NPM antara lain sebagai berikut: a) Penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi; b) Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya; c) Peralihan dan pemanfaatan kendali *input* menjadi *output*, dalam prosedur-prosedur birokrasi yang seluruhnya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif; d) Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik; e) Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya; f) Penekanan pada praktik-praktik manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi; g) Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit. Pengadopsian model NPM yang dilakukan oleh negara

berkembang ini belum diketahui efektivitasnya khususnya di Indonesia (Yuda, 2016).

Selain itu, beberapa hal yang menandakan karakteristik NPM menurut Crishtopher Hood (dalam Yuda, 2016) yang telah diterapkan di Depkeu dan BPK adalah: a) Manajemen profesional disektor publik; secara bertahap, mereka sudah mulai menerapkan, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yanag jelas, memberikan kejelasan, wewenang dan tanggung jawab; b)Penekanan terhadap pengendalian *output* dan *outcome*; sudah dilakukan dengan penggunaan *performance budgeting* yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting yang terkait dengan penekanan atas pengndalian *output* dan *outcome*; c)Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Depkeu juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon; d)Menciptakan persaingan disektor publik; hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi;

e) Mengadopsi gaya manajemen dari sektor bisnis ke sektor publik; hampir diseluruh eselon 1 di Depkeu sudah menerapkannya, dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Bea Cukai, juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Demikian juga di BPK, selain modernisasi kantor dan remunerasi, hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas dan hanya muncul dalam hal-hal profesionalisme yang dibutuhkan; f) Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya; dalam hal disiplin biaya, implementasi pada kedua instansi ini masih diragukan karena masih ada aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai adanya modal presensi menggunakan *finger print* sudah sangat efektif dilakukan.

Managerialism (Pollit, 1993), *new public management* (Hood, 1991), *market-based public administration* (Lan, Zhioying & Rosenbloom, 1992), dan *post-bureaucratic paradigm* (Barzelay, 1992) dalam Osborne dan Gaebler (1999). Namun yang paling fenomenal tentu saja pemikiran Osborne dan Gaebler (1999) tentang *entrepreneurial government* yang ditulis dalam buku mereka yang menjadi *best seller*, yaitu *Reinventing Government*. Gagasan mereka kemudian diadopsi secara luas di berbagai negara setelah pemerintahan Clinton-Gore di Amerika Serikat mengadopsinya secara sukses. Selain di Amerika, gagasan untuk mengembangkan paradigma *public managerialism* dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik juga terjadi di Eropa, terutama di Inggris ketika tekanan terhadap keterbatasan anggaran bagi penyediaan layanan publik telah memaksa pemerintahan Margaret Thatcher untuk menerapkan berbagai upaya guna lebih mengefisienkan pelayanan publik di Inggris. Rhodes (1991) dalam Applebey (1995) menyerukan perlunya diterapkan semboyan “3Es” atau *economy, efficiency dan effectiveness* agar pelayanan publik di Inggris menjadi lebih efisien.

C. Manajemen Aset Publik Kolaboratif

Manajemen publik dewasa ini merupakan bidang kajian yang mencerminkan perubahan dan penekanan terhadap

pengambilan keputusan (Denhardt (1993) yang dikutip oleh Rakhmat (2009: 170) bahwa terkait dengan praktek manajemen efisiensi, manajer public saat ini menuntut pekerjaan anggota melalui lima arti, yaitu kesanggupan untuk menilai, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan wewenang, bertindak incremental dan dedikasi terhadap public. Selanjutnya dikatakan bahwa manajemen public merupakan bidang multidimensional yang dinamis 10 ic mencakup masalah keuangan, sumberdaya manusia, perencanaan, analisis kebijakan dan pengembangan organisasi.

Keban (2008: 104) mengatakan bahwa “paradigm manajemen public mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi, yang berarti peran sector swasta yang lebih besar dan memperkecil peran sector public”. Reformasi dalam bidang administrasi public menyebabkan kolaborasi public dan swasta dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sebagai hasil dari reformasi ini dikenal istilah baru “manajemen public baru”. Pendapat McGuire (2006) dalam Kapucu 92009: 43) berpendapat bahwa perubahan sosial adalah suatu penentu dari manajemen public baru. Perubahan sosial ini diatandai dengan keanekaragaman ekstrim dimana kekuasaan terdesentralisasi dan masyarakat kebebasan untuk terlibat dlaam pengambilan keputusan.

Dewasa ini tidaklah mudah mendefinisikan “administrasi public”. Ada tiga alasan pokok, pertama karena begitu banyak definisi administrasi public. Bahkan Liang Gie (tanpa Tahun), salah seorang pakar administrasi public pertama di Indonesia, apda tahun 1970-an berhasil menginventarisir 45 definisi administrasi public, maka Nugroho (2009; 108-147), mengemukakan bahwa administrasi public berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Negara

Orientasi administrasi public sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan kepda rakyat. Dengan alasan seperti itu ilmu administrasi public lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Sehingga eksistensi ilmu administrasi public tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan ada manfaatnya bagi kepentingan orang banyak.

- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 Administrasi public dalam konteks pemerintahan yang baik menyangkut negara dan seluruh actor atau lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem politik di dalamnya. Dengan konteks ini, secara sederhana pemahaman tentang administrasi public dapat didefinisikan menjadi lima tingkat pengelompokkan, yaitu birokrasi, pemerintahan, negara dan *governance*. Model ini dikembangkan dari model pemahaman administrasi public David Bresik, Guru besar administrasi public pada *University, New York*, yang menyebutkan sebagai setting of an administrati game yang terdiri atas (dari yang paling terdalam hingga terluar); *bureau, agency, superagency, political executive, political system, (legislative, judicial, public)*, dan social system; Birokrasi, Pemerintah, Negara dan Negara-masyarakat Kepemerintahan yang baik.

Paradigma baru administrasi publik, tidak ada lagi yang jadi penonton namun semua menjadi pemain dan ikut bermain. Pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat. Keterlibatan warga masyarakat dilihat

sebagai “investasi” yang signifikan dan membangun *trust* dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya Cooper, et al. (2006) dikutip oleh Keban (2008) dalam rangka mengimplementasikan paradigma tersebut, perlu diterapkan pada *citizen-centered collaborative public management*, asalkan tidak ada tindakan birokrasi yang memanipulasi partisipasi masyarakat.

Kolaborasi tidak terjadi begitu saja dan kolaborasi harus dikelola/manage. Hal ini sejalan dengan Agranoff dan McGuire (2003: 4) bahwa manajemen public kolaborasi adalah sebuah konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan beroperasi dalam mengatur multi-organisasi atau hubungan yang sengaja dirancang untuk memecahkan masalah dengan menciptakan solusi dari sekelompok kendala yang dihadapi. Kolaborasi berarti mempekerjakan tenaga kerja untuk mencapai tujuan umum, sering bekerja melintasi batas-batas dalam hubungan multi-sektor dan multi actor. Kolaborasi didasarkan pada nilai timbal balik dan dapat mencakup masyarakat.

Manajemen public kolaborasi adalah suatu gagasan yang beresonansi dengan banyak orang, namun istilah “kolaborasi” tidak memiliki pandangan umum, atau definisi. Beberapa definisi kolaborasi; O’Leary dan Vij (2012: 1) menggambarkan tiga contoh dari tiga dekade yang berbeda diilustrasikan masing-masing oleh:

1. Gray (1989: 12-13) yang mendefinisikan “kolaborasi merupakan interorganisasional sebagai proses antara actor-aktor organisasi yang saling tergantung dan bernegosiasi untuk mencari solusi bersama.
2. Huxham (1996: 1) mendefinisikan “kolaborasi sebagai kerjasama dengan beberapa orang lain yang saling menguntungkan.”
3. Bardach (1998: 8) mendefinisikan bahwa “kolaborasi sebagai kegiatan bersama oleh dua atau lebih instansi yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai public.

Kolaborasi dalam konteks administrasi public dilakukan dengan melihat konsep tersebut dari berbagai perspektif keilmuan. Keban (2008: 122) menyatakan bahwa “kolaborasi merupakan relasi antar organisasi (sosiologi), relasi antar pemerintah (ilmu administrasi public), aliansi strategis (manajemen bisnis), network multiorganisasi

(manajemen public)". Hal ini juga sejalan dengan Pamuji (1984) bahwa administrasi public sebagai cabang ilmu social. Keempat perspektif ini menitik padatkan satu tema yang menjelaskan tentang interaksi dan relasi lintas organisasi. Administrasi public sering digunakan terminologi *governance* dalam menjelaskan ketrkaitan antar organisasi. Pengertian *governance* bukan saja pelibatan lembaga public dalam formulasi dan implementasi kebijakan, namun menjadi "penghubung berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan public (Agranoff dan Mc. Guire 2003:21)

Kapucu (2009: 58) dalam penelitian menemukan bahwa "Globalisasi, kemajuan teknologi dan perspektif baru dalam manajemen public mengakibatkan pembentukan mekanisme tata kelola kolaboratif di seluruh dunia". Desentralisasi, keterlibatan masyarakat dan pengguna akuntabel kekuasaan adalah atribut penting dalam demokrasi, dimana ditekankan pentingnya kebutuhan untuk melakukan cara manajemen public secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

D. Pengelolaan Sektor Publik

Danau Limboto sebagai sumber daya alam yang memiliki kekayaan yang sangat potensial bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Gorontalo khususnya. Sebagai aset daerah untuk kepentingan publik, Danau Limboto merupakan sumberdaya penting bagi Pemerintah Daerah sebagai penopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya memerlukan perubahan hingga menjadi baik, serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Perubahan diarahkan untuk usaha melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Sebagai upaya perubahan menurut Pamuji (1995:7), pengelolaan yang berasal dari kata "kelola", berarti sama dengan mengurus. Pengurusan, dalam arti merubah sesuatu hingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Brown, et.al (2012) mengemukakan bahwa “Pengelolaan Aset adalah cara dalam mengatur, merencanakan, mendesain, dan memonitor dalam proses mengakuisisi, memelihara, memperbarui, dan pembuangan segala bentuk infrastruktur dan aset teknis; untuk mendukung pengadaan servis publik. Aset Pengelolaan adalah sesuatu yang sistematis, suatu proses yang terstruktur, mencakupi seluruh umur hidup suatu aset fisik (e.g ‘*physical Assets*’). Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi pengadaan pelayanan dari aset yang bersangkutan, meminimalisasi resiko dan biaya, dan meningkatkan nilai positif modal alami dan sosial dalam siklus kehidupan suatu aset.

Dalam konsep administrasi publik, pengelolaan kegiatan diwujudkan melalui manajemen publik. Menurut Rainey (1990) (dalam Witter, et., 2003): ‘*public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability*’ (Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien),

pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Demikian pula menurut Graham & Hays (1991): *"public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement and dozen of other managerial and technical question"* (Manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis) (dalam Witter, et., 2003)

Dalam pengertian lain, pengelolaan mencakup prinsip-prinsip manajemen organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Trewathn dan Newport (dalam Winardi, 2001:4), yaitu melalui proses "perencanaan, pengorganisasi, menggerakkan serta mengawasi" aktivitas-aktivitas sesuatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif serta efisien. Sementara Terry (dalam Winardi, 2001:4) mengartikan manajemen adalah: "sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lain". Hasibuan (2007:5) memahami manajemen sebagai "suatu proses kegiatan yang dilakukan melalui suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang atau bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki organisasi". Pencapaian tujuan tersebut memerlukan sinergi dan semua komponen, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Usaha pencapaian tujuan tersebut dapat berhasil dengan baik apabila dilakukan secara sistematis. Setiap usaha pencapaian suatu tujuan memerlukan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang baik. Dengan kata lain diperlukan manajemen yang baik.

Istilah manajemen banyak dipahami secara sempit sebagai proses memimpin dan mengendalikan suatu perusahaan, sementara arti manajemen sangatlah luas. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut.

Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien. Menurut Kontz dan O'Donnel (Winardi 2001:16), manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang 14 yang meliputi perencanaan, pengorganisasi, penempatan, gerakan dan pengendalian. Handoko (2001:3) memberikan pengertian bahwa "Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain".

Manajemen publik mempunyai tujuan tertentu, keberhasilan tujuan tersebut tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Mengerahkan orang lain untuk tujuan yang diinginkan memerlukan keterampilan serta aktivitas khusus dan adalah seni juga ilmu dalam manajemen. Hal ini senada dengan pendapat Barnard (dalam Manullang, 2005:15) yakni, "manajemen itu adalah seni dan juga sebagai ilmu". Berarti bahwa manajemen sebagai suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efisien dan efektif.

Menurut Hasibuan (2007:2), "manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu". Kemudian Konts dan Donnel dalam Hasibuan (2007:3) menyederhanakan pengertian manajemen adalah "fungsi mencapai sesuatu melalui orang lain".

Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2002:16) menyatakan bahwa "manajemen adalah kemampuan atau keterampilan, untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain". Berarti, manajemen hendak memberi penegasan pada faktor orang, mesin dan alat atau fasilitas, dimana pusat penggerakan ada pada orang-orang didalam proses pencapaian tujuan bersama.

Saat ini istilah manajemen publik secara luas telah diterima, dan ini juga berarti suatu orientasi tindakan pada koordinasi dan saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan program publik. Organisasi Pemerintah yang mengelola kegiatan program untuk kepentingan publik,

menurut Mooley (dalam Manullang, 2005:6), dimana organisasi merupakan sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Organisasi dapat juga dipandang sebagai suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab atau antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang paling efisien. Berdasarkan uraian di atas, berarti pengelolaan Danau Limboto sebagai sektor publik menggunakan prinsip manajemen publik terdiri dari perencanaan program, penganggaran dan pelaksanaan serta koordinasi dalam upaya penyelamatan dan pelestarian danau Limboto.

Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, sebagai pengelola sektor publik di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disebut sebagai sumber daya manusia. Menurut Pfeffer (dalam Sulistiyan & Rosidah, 2009:11), bahwa sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kedudukan istimewa sumberdaya manusia ini dibanding dengan sumber-

sumber keunggulan daya saing lain yang kini semakin berkurang keampuannya, seperti teknologi produk dan proses produksi.

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa, yang menjadi fokus dalam pengelolaan sektor publik adalah manusianya. Oleh karena itu, menurut Siagian (2001:3), akhir-akhir ini perhatian dari berbagai pihak terhadap mutu kehidupan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, bukan hanya harus diakui akan tetapi harus dijunjung tinggi pula. Artinya, pengelolaan sektor publik sebagai aktivitas manajemen sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adalah proses kegiatan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan anggaran serta pengendalian berhubungan dengan tugas-tugas meningkatkan mutu kehidupan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Secara sederhana, pengelolaan sebagai aktivitas manajemen organisasi memperhatikan sumberdaya manusia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang manajemen aset publik dalam pengelolaan danau Limboto Kabupaten Gorontalo, perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang dikemukakan oleh Peter dan Yenny (dalam Widjaya dan Arsyik (2004:139), bahwa: "pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan program, penganggaran dan pelaksanaan serta koordinasi pengendalian yang berhubungan dengan tugas-tugas. Proses kegiatan perencanaan program penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi pengendalian Danau Limboto sebagai aset publik, termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola. Sumber daya manusia merupakan asset utama bagi organisasi sehingga perlu dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan secara produktif. Dalam konteks manajemen publik, sumber daya manusia merupakan unsur penggerak dalam setiap organisasi apapun bentuknya melakukan kerjasama mencapai tujuan. Sebagai unsur penggerak, sumber daya manusia dalam organisasi, dipandang sebagai suatu konsep inklusif untuk semua posisi layanan publik yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggung jawab, dan pencapaian hasil melalui aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan. Aktivitas organisasi tersebut, mencakup tindakan

mengendalikan atau memimpin, kecakapan dalam membimbing atau mengarahkan agar tujuan yang telah 16 apkan tercapai sebagaimana dikemukakan Terry(2008:1) va: "manajemen adalah pencapaian tujuan yang menetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain".

Berarti, pengelolaan sektor publik dalam konteks manajemen merupakan sebuah subyek yang sangat penting karena manajemen mempersoalkan usaha penetapan serta pencapaian sasaran. Manajemen merupakan suatu alat yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan bagi setiap orang, kelompok, organisasi pemerintah, privat dan masyarakat. Keberhasilan suatu kegiatan, faktor manusia merupakan faktor penting yang sangat menentukan berjalannya organisasi mencapai tujuan. Karena yang menjadi unsur utamanya adalah manusia, maka kemampuan dari mereka yang berperan sebagai pelaksanaan program sangat diperlukan. Pelaksanaan administrasi dan manajemen usaha dapat berjalan dengan lancar sangat ditentukan oleh kerjasama kelompok. Kelompok merupakan faktor yang dominan bagi keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan.

Pemikiran itu pula yang mendasari perlunya pengelolaan Danau Limboto sebagai aset publik dalam kegiatan kelompok yang di wadahi dalam suatu organisasi sebagai media untuk menyalurkan keinginan dan harapan. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam kelompok organisasi yaitu, keinginan dan harapan yang disepakati bersama. Beberapa orang yang menginginkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri dengan berkelompok, keinginannya itu dapat terpenuhi. Menurut Wursanto (2005:16), "Setelah rasa memiliki dari setiap anggota kelompok mulai tumbuh dan berkembang maka tumbuhlah suatu kesepakatan bersama dari para anggota kelompok yang harus ditaati oleh setiap anggota". Kesepakatan tersebut menurut Wursanto (2005:16) antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan bersama terhadap tujuan yang akan dicapai;
- 2) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan berbagai jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

- 3) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang harus ditaati oleh setiap anggota kelompok. Aturan-aturan tersebut dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis;
- 4) Kesepakatan bersama dalam hal menetapkan berbagai sarana yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan tersebut;
- 5) Kesepakatan bersama dari para anggota dalam hal menetapkan cara atau metode yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Demikian pula dalam pengelolaan sektor publik, pembentukan organisasi menurut Herbert G.Hicks (dalam Winardi,2001:8), perlu memperhatikan berbagai tipe organisasi, di antaranya ada organisasi yang disebut sebagai berikut : "organisasi-organisasi bersifat sangat variabel". Sesuatu organisasi dapat menjadi fokus sentral kehidupan seseorang, atau ia mungkin hanya merupakan perannya untuk sementara waktu. Sebuah organisasi mungkin dapat bersifat kaku, "dingin", tanpa kepribadian, atau ia kadang-kadang dapat menghasilkan hubungan-hubungan luwes dan bermakna bagi para anggotanya".

E. Kolaborasi Governance

Isu kolaborasi dalam pengelolaan kegiatan program merupakan suatu isu yang amat penting dimana kolaborasi diletakkan sebagai aspek fundamental. Sekaligus kolaborasi juga merupakan karakter pokok dari aktivitas organisasi. Usaha kolaborasi dapat pula dinyatakan seperti partisipasi keterlibatan (*involvement*), pemerataan kekuasaan (*power sharing*), dan sejenisnya kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu usaha penuh kepercayaan yang didasarkan atas tidak adanya kecurigaan dan kedewasaan pengertian atas peranan-peranan dan penugasan-penugasan. Usaha ini lebih bersifat demokratis dan partisipatif.

Dalam penyediaan pelayanan tersebut, kepuasan masyarakat sebagai pelanggan menjadi ukuran keberhasilan. Program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan kolaborasi. Menurut Thoha (2008:214) kolaborasi merupakan sebuah konsep pengelolaan organisasi, diwujudkan dalam bentuk; partisipasi keterlibatan (*involvement*) dan pemerataan kekuasaan (*power sharing*). Kolaborasi diartikan sebagai suatu usaha penuh kepercayaan (tanpa kecurigaan) serta pendelegasian penuh atas peran dan penugasan yang telah diberikan kepada bawahan.

Menurut Ansell dan Gash ditegaskan kembali oleh Thoha (2008:214, bahwa selama beberapa dekade terakhir terdapat perkembangan baru dimana penyelenggaraan pemerintahan mulai mengembangkan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak yang melibatkan instansi, swasta secara kolektif serta lembaga-lembaga publik untuk membuat perjanjian dalam pengambilan keputusan yang berorientasi kesepakatan.

Suatu organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi dimana terdapat distribusi kuasa dan kewenangan secara proporsional, maka setiap keputusan bersama harus melalui proses dinamika dialog bahkan perdebatan di antara para stakeholder. Paling kurang terdapat 3 faktor penting dalam proses pengambilan keputusan yang menerapkan prinsip kolaboratif, menurut Ansell dan Gash (dalam Thoha, 2008:214), antara lain:

1. Menciptakan suasana diskursus yang dilakukan secara terbuka melalui proses tatap muka;

2. Mewujudkan atmosfir organisasi yang memungkinkan tercipta suasana dialogis dalam rangka membangun hubungan saling percaya.
3. Mengembangkan komitmen dan pemahaman bersama
- 18 tentang masalah bersama.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam proses kolaborasi, terdapat lima tahapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama yang meliputi;

1. Membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam komitmen kolaboratif;
2. Mengembangkan rencana strategis. Tahapan ini penting dalam rangka menjabarkan hasil kesepakatan bersama pada tingkat aplikatif (*action plan*) yang dituangkan dalam bentuk agenda atau rencana strategis.
3. Mengambil tindakan. Setiap rencana kegiatan atau program bersama harus dilaksanakan secara konsisten dalam bentuk karya nyata.
4. Strategi dalam memberikan layanan serta mengimplementasikannya.

Disisi lain menurut Thoha (2008:214), kolaborasi dapat pula dimaknai sebagai keinginan untuk membangun toleransi atas tindakan cepat dan resmi dari pimpinan yang menginginkan perubahan agar tercapai kemajuan organisasi. Dari dua konteks pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi memiliki makna ibarat pisau bermata dua. Mata yang satu mempunyai toleransi dengan pihak pimpinan yang menghendaki adanya perubahan dan pengembangan organisasi. Namun mata yang lain berkaitan dengan upaya merangkul keinginan-keinginan, saran-saran, kritik-kritik dan keluhan dari pihak bawahan yang secara utuh menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Dalam realitasnya menurut Thoha (2008:214), sering kali dijumpai praktik kolaborasi ditafsirkan dan diimplementasikan menyimpang dari tujuan semula. Banyak terjadi persoalan-persoalan yang menjadikan kolaborasi kurang efektif. Di Negara demokrasi, membangun masyarakat dalam paradigma pengelolaan negara dengan Program pembangunan dalam upaya penyelamatan Danau Limboto, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bermukim disekitar danau.

Upaya tersebut merupakan aktualisasi dari konsep pembangunan menurut rumusan UNESCO (Poostchi, 1986 dalam Soetomo, 2006: 4), bahwa “Tujuan pembangunan masyarakat bukan membangun barang melainkan membangun orang dan membangun masyarakat”.

Pentingnya pembangunan dimaksudkan untuk mengatasi masalah pokok masyarakat yang berpendapatan rendah. Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia menurut Ndraha (1999:20), dimaksudkan adalah perubahan kearah yang diinginkan dalam proses pembangunan itu membutuhkan kolaborasi sebagai bentuk kerjasama yang terintegrasikan pada satu kesatuan dalam organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terbagi menjadi bagian-bagian fungsional senantiasa dituntut untuk dapat bersinergi dalam satu irama yang serasi dan terpadu. Untuk mewujudkan sinergitas segenap bagian-bagian dalam suatu organisasi, maka diperlukan fungsi koordinasi dan komunikasi yang efektif.

1. Koordinasi Dan Komunikasi

Menurut Handoko (2003:196) “kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya”. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayani (1995:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga menjelaskan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Terdapat 3 (tiga) macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thompson (dalam Handoko, 2003:196), yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Menurut Mc. Farland (dalam Handayani, 1995:89) mengartikan “koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”. Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan “koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”.

Handoko (2003:196) menyebutkan bahwa “derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor

lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi”.

Dalam koordinasi menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

- 1) Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 20 Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Menurut Handyaningrat (1995:89-90), bahwa dalam koordinasi terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
- b. Adanya proses (*continues process*). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
- d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus

mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

- e. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, menunjukkan bahwa koordinasi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi karena merupakan salah satu prinsip dari manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan atau sasaran organisasi secara efisien. Dalam teori organisasi juga mengkaji tentang fungsi mengkoordinasikan pola-pola interaksi anggota organisasi secara formal karena di dalam struktur organisasi terdapat komponen kompleksitas, formalitas, dan sentralistik. Kompleksitas organisasi yang merujuk pada tingkat deferensiasi termasuk di dalamnya spesialisasi, tingkat pembagian kerja dan jumlah tingkatan dalam hirarki. Formalisasi yaitu mengatur prosedur kerja setiap unit organisasi sedangkan sentralisasi mempertimbangkan tentang dimana pusat pengambilan keputusan.

Ada dua konsekuensi utama dalam membangun koordinasi yaitu; (1) suatu unit tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lain; (2) tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan.

Prinsip-prinsip koordinasi yang mengacu pada teori Mooney dan Reile, ditekankan kembali Sugandha (199:16) secara ringkas dikemukakan seperti berikut :

- a. Untuk mencapai tujuan bersama, maka prinsip organisasi senantiasa bertumpu kepada koordinasi. Prinsip koordinasi diterapkan melalui proses bertingkat (*scalar process*). Hasil dari proses ini akan berupa efek fungsional (*functional effect*) sebagai rumusan tugas-tugas setiap orang dalam rantai bertingkat tadi.
- b. Koordinasi harus mempunyai prinsipnya sendiri, proses dan efeknya sendiri pula. Dalam hal ini dasar dari prinsip koordinasi adalah kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk mengkoordinasikan. Kewenangan ini digerakkan atau dijadikan berproses oleh koordinasi prosesif (*processive coordination*) yang berupa semua kegiatan dirancang dalam rangka menciptakan kesatuan dan arah kegiatan. Hasil proses ini berupa koordinasi yang berhasil guna (*effective coordination*)
- c. Prinsip yang menentukan dari proses bertingkat adalah kepemimpinan (*leadership*), yang dijadikan berproses melalui delegasi kewenangan kepada bawahan. Hasilnya akan berupa definisi fungsional atau penugasan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban sebagai efek kepemimpinan.
- d. Efek fungsional seperti terlihat pada butir pertama, merupakan hasil akhir prinsip koordinasi yang berarti adanya kewajiban dan tanggung jawab orang-orang di dalam organisasi

Pentingnya komunikasi untuk koordinasi seperti yang digambarkan oleh Pfiffner bahwa "*communication and coordination are inseparable parts of administration.*" Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, perlu ada struktur dan jalur komunikasi yang tepat serta tata kerja yang sempurna. Koordinasi sebagai syarat bagi kemajuan organisasi harus

ditunjang oleh sistem komunikasi efektif. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang 22 1 diciptakan. Untuk itulah maka perlu diciptakan suasana struktur organisasi yang memungkinkan koordinasi dan komunikasi mewujudkan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. (Thoha, 2008).

Menurut Terry sebagaimana ditekankan kembali oleh Handoko, 2003:195, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

F. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan mereka pada setiap aktivitas pembangunan. Menurut Kartasmita (1996:133) ada dua pokok persoalan yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan, yaitu: *pertama*, konsep pembangunan yang berakar pada kerakyatan, dan *kedua*, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarkan kerakyatan.

Pemberdayaan masyarakat, membutuhkan intervensi Pemerintah sebagai upaya memfasilitasi program-program pembangunan. Ada 2 (dua) model intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah, yakni intervensi pada level “makro” dan level “mikro”. Intervensi makro menggambarkan bagaimana institusi Negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan dalam suatu masyarakat. Sedangkan intervensi mikro, dimana individu dan kelompok dalam masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri.

Pada tataran intervensi tersebut, menurut Glen sebagaimana ditekankan kembali oleh Adi, 2003:81, mengacu pada 3 (tiga) aktivitas yaitu: pengembangan masyarakat, pendekatan pelayanan masyarakat, dan aksi komunitas. Ketiga aktivitas tersebut menyangkut

pengembangan program pembangunan memberdayakan masyarakat. Sehubungan itu, menurutnya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu: 1) Mengembangkan layanan dalam organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; 2) Memaksimalkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi; 3) Mendukung terciptanya kolaborasi antar beberapa organisasi guna memenuhi minat masyarakat. Penjelasan ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Layanan

Pengelolaan danau Limboto, membutuhkan organisasi yang responsif atau tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan layanan, terdapat empat tingkat ketanggapan (*responsiveness*) organisasi yaitu, organisasi yang tidak responsif (*unresponsive organizations*), organisasi yang kadangkala responsif (*casually responsive*), dan organisasi yang sangat responsif secara menyeluruh.

Organisasi yang tidak responsif dicirikan, dengan mentalitas birokrasi yang tidak personal (*impersonal*) yang lebih menghargai pada struktur komando baku dalam organisasi dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi cenderung bertindak sebagai pihak yang tahu tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Staf yang berhubungan dengan masyarakat seringkali bersikap terlalu resmi dan kurang ramah terhadap masukan dari masyarakat. Dalam hal pengelolaan danau Limboto, organisasi Pemerintah mengembangkan layanan masyarakat dengan cara lebih peduli pada penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar danau, dibanding dengan membangun jalan dan fasilitas infrastruktur lainnya.

2. Pelibatan Masyarakat

Pengelolaan danau Limboto, perlu melibatkan masyarakat yang berada disekitar danau. Broady dan Hedley sebagaimana ditekankan kembali oleh Adi, 2003:170 bahwa dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, suatu organisasi harus mendorong berkembangnya provisi dari komunitas (*communities provision*), konsultasi komunitas, kerja sama komunitas, kemandirian dalam manajemen lembaga swakelola, dan kontrol masyarakat. Selanjutnya provisi dari komunitas dicirikan dengan pelibatan otoritas lokal yang formal (seperti pejabat dan petugas ditingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan) atau tokoh-tokoh informal sebagai penyedia layanan langsung terhadap masyarakat serta pengelola berbagai fasilitas umum dan sosial untuk masyarakat. Sedangkan konsultasi komunitas didalamnya mencakup upaya untuk mengkaji opini masyarakat terhadap suatu proposal rencana pembangunan masyarakat. di tingkat lokal.

Pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat tergantung dari kemampuan rakyat itu sendiri untuk merubah nasibnya. Dalam arti bahwa pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan rakyat dalam merubah nasibnya. Hal itu sesuai pandangan Chambers sebagaimana ditekankan kembali oleh Kartasasmita 1996:142, bahwa konsep pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered*” (pembangunan berpusat pada manusia), *participatory* (adanya partisipasi aktif), *empowering*, and *sustainable* (adanya pemberian kekuatan yang pada gilirannya menciptakan keberlanjutan)”.

3. Penciptaan Kolaborasi

Pengelolaan danau Limboto dilakukan dengan menciptakan kolaborasi antar lembaga-lembaga yang berkepentingan dan masyarakat dengan menciptakan kerja sama antar lembaga serta petugas pelayanan masyarakat

yang diharapkan dapat membantu jalinan hubungan antara organisasi dimana dia bernaung dengan berbagai organisasi yang mempunyai minat dan kajian yang sama. Jalinan kerjasama antar lembaga ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masing-masing anggota lembaga, terutama dalam kaitan dengan isu tertentu, seperti: bagaimana menciptakan satu program yang dapat memaksimalkan keterlibatan masyarakat, bagaimana mengembangkan suatu bentuk layanan masyarakat yang lebih baik, dan bagaimana cara mengelolah suatu sumber daya yang sangat terbatas dengan baik.

Glen ditekankan kembali oleh Adi, 2001:173, menyatakan bahwa 'kerja sama antar lembaga sangat penting, terutama dalam upaya mempromosikan suatu perencanaan sosial dan koordinasi antar lembaga. Kekurangan sumberdaya masyarakat antara lain diindikasikan oleh kemiskinan, yang jika diidentifikasi ternyata sangat kompleks terkait yaitu; Pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik dalam motivasi maupun penguasaan tehnologi; Kedua, dukungan masyarakat dalam berpartisipasi setiap program pemberdayaan, dan ditunjang dengan SDM masyarakat yang baik; Ketiga, prasarana dan sarana yang belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan keempat, berkaitannya prosedur dan peraturan yang ada yang tidak kondusif bagi pengembangan kemandirian masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini, baik bersifat internal maupun eksternal mengakibatkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok, wilayah dan sekitar yang kaya dan mampu.

G. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian teori tersebut di atas, penelitian tentang manajemen aset publik studi pengelolaan Danau Limboto, secara konseptual mengacu pada pendapat Peter dan Yenny sebagaimana ditekankan kembali oleh Widjaya dan Arsyik (2004:139, mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta koordinasi yang berhubungan dengan tugas-tugas. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta koordinasi yang

dilaksanakan secara kemitraan yang kolaboratif antara Pemerintah, swasta dan masyarakat seperti digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep penelitian tentang Manajemen Aset Publik Studi Pengelolaan Danau Limboto yang dimaksudkan adalah bahwa pengelolaan aset Danau Limboto melalui peran dan pola interaksi pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam kegiatan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan Danau Limboto yaitu:

1. Pengelolaan Danau Limboto melalui peran pemerintah, swasta dan masyarakat, yaitu proses pengelolaan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi yang mengarah pada perubahan mindset masyarakat khususnya masyarakat pesisir Danau Limboto agar tidak tertarik lagi pada masalah Danau Limboto (pengkaplingan area, penguasaan lahan, pembiakkan enceng gondok) serta mendorong peningkatan PAD.
- Pengelolaan Danau Limboto melalui interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui hubungan kerjasama (*cooperation*) mereka, memungkinkan terjadinya hubungan saling memengaruhi satu sama lainnya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan Danau Limboto yang memungkinkan terciptanya *Collaborasi Governance* dan terwujudnya kemandirian

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Garna (2007: 77) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah menekankan pada konstruksi dari realitas secara social yang dikaitkan dengan variable yang terkait dengan masalah yang dapat menajamkan kajian.

B. Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa hasil observasi dan wawancara dengan informan/narasumber. Informan adalah orang yang mengetahui dan mengerti tentang manajemen asset public dalam pengelolaan danau Limboto. Informan yang dibutuhkan disesuaikan dengan data dan informasi yang diperlukan dapat dispesifikasi yang mewakili sebagai berikut:
 - a. Dinas Pemerintahan Provinsi Gorontalo (BAPPPEDA, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian, Perikanan, Biro Hukum Provinsi Gorontalo berjumlah: 9 (Sembilan) orang.
 - b. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (BWS), berjumlah 2 (dua) orang
 - c. Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS), berjumlah 1 (satu) orang
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo, berjumlah 1 (satu) Orang
 - e. BAPPEDA Kabupaten Gorontalo, berjumlah 2 (dua) orang
 - f. BAPPEDA Kota Gorontalo, berjumlah 1 (satu) orang
 - g. PU Provinsi Gorontalo, berjumlah 1 (satu) orang
 - h. Legislatif Provinsi Gorontalo, berjumlah 1 (satu) orang
 - i. Pemerintah Desa pesisir Danau Limboto berjumlah 2 (dua) orang
 - j. LSM Kecamatan Telaga dan Kota Gorontalo berjumlah 2 (dua) orang
2. Data sekunder, yang bersumber dari dokumen dan foto, arsip, jurnal, karya ilmiah dan data statistic baik dari pihak pemerintah, masyarakat serta publikasi media masa, dokumen laporan program kerja (POKJA) masing-masing stakeholders.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Focus dari penelitian ini indicator-indikator yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Fokus dimensi peran actor dalam proses pengelolaan danau Limboto:
 - a. Perencanaan: 1) Penetapan rencana tujuan dan sasaran, 2) Mengidentifikasi masalah factor pendukung dan penghambat, 3) penetapan rencana tujuan alternative.
 - b. Penganggaran: 1) Penyusunan kebutuhan anggaran, 2) Mensinergikan pelaksanaan anggaran 3) mengendalikan penggunaan anggaran
 - c. Pelaksanaan: 1) Pelaksanaan kebijakan 2) kemitraan dalam pelaksanaan, 3) Pengendalian metode kerja pengelolaan.
 - d. Koordinasi: 1) Kesatuan komando dalam pencapaian tujuan, 2) sinergitas dalam pencapaian tujuan 3) kolaborasi praktik dua pihak atau lebih.
2. Fokus pola intraksi aktor dalam proses pengelolaan danau Limboto secara kolaboratif:
 - a. Perencanaan: 1) Pola intraksi aktor dalam penetapan rencana tujuan dan sasaran, 2) Pola intraksi aktor dalam mengidentifikasi masalah factor pendukung dan penghambat, 3) Pola intraksi aktor dalam penetapan rencana tujuan alternative
 - b. Penganggaran: 1) Pola intraksi aktor dalam penyusunan kebutuhan anggaran, 2) Pola intraksi aktor dalam pelaksanaan penggunaan anggaran 3) Pola intraksi aktor dalam pengendalian penggunaan anggaran
 - c. Pelaksanaan: 1) Pola intraksi aktor dalam pelaksanaan kebijakan 2) Pola intraksi aktor dalam kemitraan pelaksanaan, 3) Pola intraksi aktor dalam pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan.
 - d. Koordinasi: 1) Pola intraksi aktor dalam kesatuan komando pencapaian tujuan pengelolaan danau Limboto, 2) Pola intraksi aktor dalam sinergitas dalam pencapaian tujuan, 3) Pola intraksi aktor kolaborasi dua pihak atau lebih.
3. Fokus prototype Model Manajemen asset Publik yang akan direkomendasikan dalam proses pengelolaan danau Limboto di Kabupaten Gorontalo, merupakan temuan, analisis peran dan pola interaksi pemerintah, swasta dan masyarakat serta sintesis dalam pengelolaan danau Limboto.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu oleh alat-alat penelitian seperti 1) Pedoman wawancara mendalam tentang peran dan pola interaksi aktor

dalam proses pengelolaan danau Limboto, program kerja (POKJA) 2) Observasi, pengamatan kasus peran dan pola interaksi aktor yang terjadi pada proses pengelolaan danau Limboto.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengabsahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Creswell (2010) bahwa penelitian kualitatif melibatkan jenis strategi pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengamatan Langsung/Observasi
- b. Teknik Wawancara Mendalam

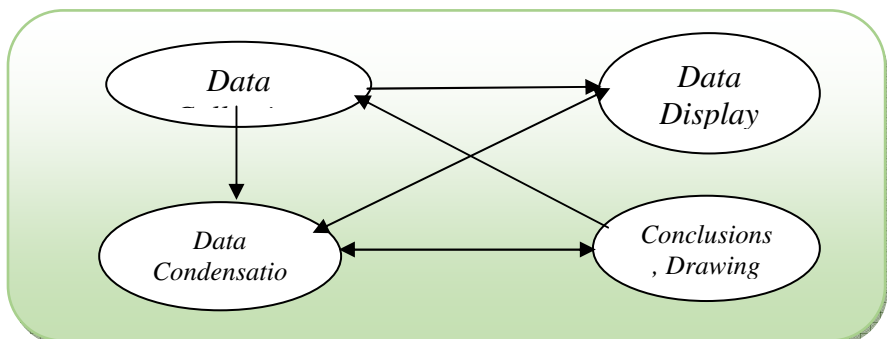
28 Dokumentasi

2. Pengabsahan Data

Pengecekan ataupun pemeriksaan keabsahan data yang menjadi temuan penelitian, dikemukakan oleh Moleong (2010: 324) dan Bugar (2008:255) di pertegas kembali oleh menurut Sugiyono (2017: 270) bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 1) Uji Kredibilitas Data/Derajat Kepercayaan (*credibility*), 2) Derajat keteralihan (*transferability*), 3) Derajat Ketergantungan (*dependability*), dan Derajat kepastian (*confirmability*).

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data ini mengikuti langkah-langkah analisis menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 32) ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Danau Limboto dalam Lintasan Sejarah

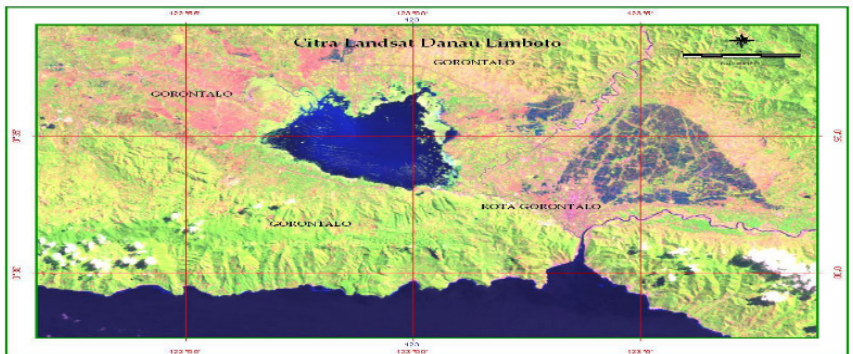
Legenda Danau Limboto dahulu merupakan lautan maha luas. Suatu ketika air laut itu surut, kemudian terciptalah hutan dan semak belukar. Dari sanalah keluar mata air jernih, tempat para bidadari khayangan kerap mampir untuk mandi. Setidaknya begitu bunyi dalam buku cerita rakyat yang disusun Karmin Baruadi, pengajar di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo (UNG Press.2005). Konon, di sekitar danau itu, kemudian banyak tumbuh pohon jeruk yang menebarkan aroma wangi, nama Danau Limboto berasal dari *Bulalo lo Limu o Tutu* (Danau dari jeruk yang berasal dari khayangan). Daya tarik danau Limboto diberkahi hamparan bunga teratai, eceng gondok, dan gelagah yang menjadikan danau ini seperti kolam raksasa yang sangat cantik, dan kekayaan flora dan faunanya yang luar biasa. Keindahan pemandangan alam danau Limboto pada setiap pagi hari saat terbit matahari, dan menjelang sore hari ketika matahari terbenam pemandangan danau Limboto benar-benar memukau.

B. Kondisi Demografis

Danau Limboto terletak pada bagian tengah Provinsi Gorontalo. Batas administratif danau Limboto sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo; Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan batas administrasi danau Limboto menunjukkan bahwa luasan wilayah danau Limboto

70% berada di wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo dan 30% berada di wilayah administrasi Kota Gorontalo yakni Kecamatan Kota Barat.

30



Gambar 4.1: Peta Wilayah Administrasi Danau Limboto
Sumber: BWS II Sulawesi 2017

C. Kependudukan

Sejak ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi (KSP) tahun 2016, terdapat empat belas (14) kecamatan serta seratus tigapuluh dua (132) jumlah desa, tersebar di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, yang termasuk lingkup wilayah/kawasan Daerah Aliran Sungai menuju Danau Limboto. Jumlah kecamatan yang lebih dominan di lalui oleh DAS danau Limboto adalah Kecamatan Tibawa, disusul oleh Kecamatan Bongomeme dan Kecamatan Limboto. Sebaliknya Kabupaten Gorontalo Utara satu desa yaitu Desa Botuwombato saja yang dilalui oleh

DAS Danau Limboto, dan dari Kota Gorontalo berjumlah lima kelurahan dan semua kelurahan tersebut berada di Kecamatan Kota Barat.

E. Mata Pencanharian.

Kawasan danau Limboto secara umum dapat dibagi dalam dua wilayah yaitu (1) wilayah pesisir danau dan (2) wilayah hulu danau. Wilayah hulu secara umum penduduknya memiliki mata pencaharian disektor pertanian. Sebaliknya penduduk wilayah pesisir memiliki mata pencaharian disektor perikanan, baik sebagai nelayan, budi daya ikan air tawar maupun sebagai pedagang ikan hasil tangkapan.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah, Sector Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Danau Limboto				
Fokus masalah	Deskripsi focus	Implikasi Teori	Temuan Penelitian	Sintesis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1). Perencanaan (Planning)				
Proses Perencanaan pengelolaan Danau Limboto	1. Peran dalam Penetapan tujuan dan sasaran	Merupakan kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju. Melalui tujuan khusus dan tujuan umum. Atau menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek (Amirullah & Budiyo: 2004: 92).	Penetapan rencana tujuan dan sasaran pengelolaan danau Limboto belum sampai pada tahap implementasi di lapangan. Peran sector swasta dalam penetapan rencana tujuan dan sasaran pengelolaan danau masih minim, peran masyarakat dalam masih perlu ditingkatkan lagi	Pemerintah dalam merumuskan rencana tujuan dan sasaran pengelolaan danau Limboto bersama dengan masyarakat sebaiknya diseriisi sampai pada tahap implementasi di lapangan dan dengan melibatkan sector swasta.
	2. Peran dalam Mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat	Untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin peluang dan kesempatan yang ada, serta mengantisipasi kemungkinan datangnya ancaman dan hambatan dan dengan dengan	Dalam mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat pengelolaan Danau Limboto, belum melibatkan peran sector swasta dalam mengidentifikasi factor penentu pengelolaan	Factor penentu pengelolaan Danau Limboto adalah dengan melibatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memanfaatkan peluang agar meraih kemudahan, mngantisipasi kemungkinan

		mempersiapkan pemecahan masalah jika memang benar-benar terjadi (Louis A. Allen)	danau Limboto, serta peran masyarakat yang masih perlu didorong dan ditingkatkan lagi.	ancaman terhadap penyelamatan Danau Limboto
	3. Peran dalam Menyusun langkah-langkah alternatif	Merupakan penetapan inteligensia untuk mengolah fakta-fakta dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah, (Budiati: 2012: 129).	Dalam menyusun untuk Badan Otorita Danau Limboto, sebagai langkah alternatif belum terrealisasi. Peran sector swasta belum dilibatkan, serta peran masyarakat belum optimal.	Langkah alternative pengelolaan Danau Limboto melalui penetapan inteligensia Badan Otorita Danau Limboto dengan melibatkan Peran pemerintah, swasta dan masyarakat
2). Penganggaran (<i>Budgeting</i>)				
Proses Penganggaran pengelolaan Danau Limboto	a. Peran dalam Penyusunan Penetapan Kebutuhan Anggaran	Merupakan entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public. (Mardiasmo (2004: 2)	Peran pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan anggaran belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Belum dilibatkannya sector swasta dalam penetapan kebutuhan anggaran pengelolaan danau Limboto.	Penyusunan penetapan kebutuhan anggaran Danau Limboto, merupakan entitas public, yang harus menyentuh kebutuhan masyarakat, dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public dengan melibatkan peran pemerintah, swasta dan legislative dalam proses penganggaran pengelolaan Danau Limboto.

	b. Peran dalam Mensinergikan Penggunaan Anggaran	Merupakan kerjasama kreatif dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan asset public. (Mardiasmo (2004: 29)	Peran dalam mensinergikan penggunaan anggaran khususnya anggaran APBN danau Limboto dominan dikelola oleh BWS II Sulawesi, belumbekerjasama secara langsung dengan sector swasta, dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat di pesisir danau Limboto.	BWS II Sulawesi dalam pelaksanaan Penggunaan anggaran APBNSebaiknya bekerjasama secara kreatif dengan actor public di daerah, (Provinsi/Kabupaten/ Kota) untuk memaksimalkan peran swasta dan peran masyarakat serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir danau Limboto.
	c. Peran dalam Pengendalian Metode Penggunaan Anggaran	Merupakan rencana organisasi yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditatnya kebijakan manajemen. (Krismiaji: 2002: 218)	Peran pemerintah daerah belum sampai pada pengendalian anggaran. Sebab pengguna anggaran APBN Danau selama ini adalah BWS, BPDAS di daerah, tanpa berinteraksi secara langsung dengan sektor swasta (dari Gorontalo) dan masyarakat dipesisir danau, dan belum melibatkan mereka dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur danau.	Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN pengelolaan Danau Limboto, sebaiknya BWS, BPDAS melibatkan pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa dalam menjamin keakuratan informasi dan kepercayaan masyarakat serta untuk menghindari kerugian daerah dan masyarakat.

3). Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)				
Pelaksanaan Kebijakan	1. Peran dalam Pelaksanaan Kebijakan	Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan public Menurut Edward III (1980: 1)	Instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Danau Limboto belum diseriusi sampai pada tahap implementasi di lapangan. Sector swasta berperan dalam bentuk kontrak kerja BWS-swasta, sedangkan peran masyarakat masih minim	Pentingnya implementasi kebijakan merupakan wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan danau Limboto dengan melibatkan sector swasta dan masyarakat secara langsung.
	2. Peran dalam Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan	Merupakan jalinan kerjasama usaha, strategi bisnis antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan (Abidin: 2012: 162)	Implementasi kebijakan pengelolaan danau Limboto masih parsial. Egosisme sectoral mewarnai pelaksanaan kebijakan Pengelolaan danau Limboto,	Untuk menghindari egoisme sectoral dalam pengelolaan danau Limboto, maka perlunya jalinan kerjasama peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip simbiosis.
	3. Peran dalam Pengendalian Metode Kerja Pengelolaan Danau Limboto	Merupakan bagian terpenting dari proses pengendalian adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan, (dalam Budiyo Amirullah: 2004: 98).	Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum diberi ruang dalam Pengendalian metode kerja pengelolaan danau Limboto. Sektor swasta, hanya berperan sebagai pelaksana teknis, bermitra	Pengendalian metode kerja pengelolaan Danau Limboto sebagai tindakan korektif bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo seharusnya diberikan peran yang sama dalam pengendalian metode kerja yang efektif dan efisien dengan

			dengan BWS. Peran masyarakat belum diberdayakan dalam pengelolaan Danau Limboto.	melibatkan sector swasta masyarakat pesisir Danau Limboto
4). Koordinasi (<i>Coordinatin</i>)				
Peran Koordinasi	1. Peran dalam Kesatuan Komando	Merupakan proses menyatukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit atau bagian dari fungsional suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, (Stoner dan Wankel: 1986)	Penyatuan tujuan dan kegiatan dari masing-masing unit kerja pengelola danau Limboto belum optimal. Pelaksanaan Pokja danau oleh masing-masing unit SKPD masih berfariatif. Belum adanya komitmen actor (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam menyelaraskan pencapaian tujuan pengelolaan danau Limboto.	Penyelarasan dan penyatuan tujuan pengelolaan danau Limboto secara efektif, dibutuhkan komitmen bersama (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pokja danau Limboto, untuk pencapaian tujuan pengelolaan danau Limboto.
	2. Peran dalam Sinergitas Pencapaian Tujuan	Merupakan proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang dan kelompok tersusun menjadi satu kebutuhan terintegrasi dengan cara seefisien mungkin (Siagian:	Peran pemerintah Daerah dalam menggerakkan partisipasi multipihak, termasuk sector swasta dan masyarakat belum optimal. Masing-masing unit kerja SKPD berjalan	Pemerintah sebagai dinamisor berperan dalam menggerakkan partisipasi multipihak, termasuk sector swasta dan masyarakat dalam proses pembagian kerja pengelolaan danau Limboto menjadi satu

		1978)	dengan program kerja dan pencapaian tujuan berbeda-beda. Sektor swasta dan masyarakat. masing-masing berjalan dengan kepentingannya sendiri-sendiri.	kebutuhan yang terintegrasi secara efisien dan efektif demi pencapaian tujuan penyelamatan Danau Limboto
	3. Peran dalam Kolaborasi antar dua pihak atau lebih	Merupakan interorganisasional proses antara actor-aktor organisasi yang saling tergantung dan bernegosiasi untuk mencari solusi bersama (Gray 1989:12-13).	Kerjasama dua pihak atau lebih dalam pengelolaan danau Limboto belum berjalan. Peran BWS II Sulawesi dalam pengelolaan Danau Limboto cukup dominan. Berimplikasi pada peran pemerintah daerah dalam berkolaborasi dengan actor-aktor lainnya tidak berjalan dengan baik.	Penyelamatan danau Limboto tergantung pada Interorganisasional actor dalam berkolaborasi (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam rangka mencari solusi penyelamatan Danau Limboto secara bersama, melalui prinsip otoneomi daerah dalam pengelolaan Danau Limboto.
2. Pola Interaksi pemerintah, sector swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto				
Fokus masalah	Deskripsi fokus	Implikasi teori	Temuan Penelitian	Sintesa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1). Perencanaan (Planning)				
Pola Interaksi dalam Proses Perencanaan pengelolaan	a. Interaksi dalam penetapan tujuan dan sasaran	Merupakan kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju. Atau menetapkan tujuan jangka panjang dan	Kerjasama dalam merencanakan tujuan pengelolaan danau Limboto sudah ada, namun belum menunjukkan	Hubungan kerjasama dalam Pola interaksi dalam penetapan tujuan dan sasaran pengelolaan danau Limboto perlu diseriisi oleh actor public melalui

--	--	--	--	--

Danau Limboto		jangka pendek (Amirullah & Budiyo: 2004: 92).	hubungan kerjasama yang serius antara pemerintah swasta dan masyarakat (G2G), (G2B), (G2C) dalam pengelolaan danau Limboto	G2G), (G2B), (G2C) dalam merencanakan arah kebijakan pengelolaan danau Limboto.
	b. Interaksi dalam mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat	Untuk dapat meraih kemudahan dan memanfaatkan seoptimal mungkin peluang dan kesempatan yang ada, serta mengantisipasi kemungkinan datangnya ancaman dan hambatan dan dengan mempersiapkan pemecahan masalah jika memang benar-benar terjadi (Louis A. Allen)	Hubungan kerjasama dalam mengidentifikasi factor penentu pengelolaan Danau Limboto sudah ada. Namun hubungan kerjasama dalam mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat G2G, dan G2B dalam pengelolaan danau Limboto belum berjalan dengan baik. Apalagi hubungan kerjasama G2C masih minim.	Kerjasama actor dalam mengidentifikasi factor penentu dan penghambat pengelolaan danau Limboto melalui (G2G), (G2C), (G2B), dan (B2C) merupakan factor determinan keberhasilan dalam mempersiapkan pemecahan masalah pengelolaan Danau Limboto.
	c. Interaksi menyusun langkah-langkah alternatif	Merupakan penetapan inteligensia untuk mengolah fakta-fakta dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah, (Budiati: 2012: 129).	Hubungan kerjasama actor dalam menyusun langkah alternatif pengelolaan Danau Limboto melalui kerjasama (G2G), (G2C), (G2B), dan (B2C) yang saling memengaruhi	Kemampuan untuk bekerjasama dalam menyusun langkah-langkah alternative pengelolaan danau Limboto dalam membentuk Badan Otorita Danau, dan interaksi antara (G2G), (G2C), (G2B), dan (B2C),

			dalam menyusun langkah-langkah alternative termasuk pembentukan Badan Otorita Danau.	merupakan intelegensia actor dalam rangka pemecahan masalah
2). Penganggaran (<i>Budgeting</i>)				
Pola Interaksi dalam Proses Penganggaran pengelolaan Danau Limboto	1. Interaksi dalam penyusunan Penetapan Kebutuhan Anggaran	Merupakan entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public. (Mardiasmo (2004: 2)	Proses penyusunan kebutuhan anggaran telah dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Namun sejak ditetapkannya Danau sebagai kawasan strategis nasional, penetapan anggaran pengelolaan danau (APBN) difokuskan pada pembangunan fisik danau (tanggul, cekdam dll), belum menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir danau Limboto.	Entitas aktivitas actor publik dilakukan melalui G2G, G2B dan G2C, agar penyusunan Penetapan Kebutuhan Anggaran berjalan sesuai harapan <i>good governance</i> untuk menghasilkan pelayanan public, memenuhi kebutuhan dan hak public pengelolaan danau Limboto.
	2. Interaksi dalam mensinergikan Penggunaan Anggaran	Merupakan kerjasama kreatif dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan danau Limboto	Penggunaan anggaran APBN pengelolaan Danau Limboto yang dikelola oleh BWS II Sulawesi,	Untuk menghindari egoism sectoral dalam penggunaan anggaran danau Limboto perlu kerjasama kreatif dalam pelaksanaan

			bekerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan tanggul, justru swasta yang berasal dari daerah Makassar, masih mencerminkan egoism sectoral dalam penggunaan anggaran pengelolaan danau Limboto	penggunaan anggaran sebagai kebutuhan mutlak antara G2G, Pusat/Daerah, G2C, serta serta melibatkan sector swasta yang berasal dari Daerah Gorontalo.
	3. Interaksi pengendalian Metode Penggunaan Anggaran	Merupakan rencana organisasi yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditatnya kebijakan manajemen. (Krismiaji: 2002: 218)	Hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah belum sampai pada tahap pengendalian anggaran. APBN Danau adalah BWS, BPDAS di daerah, belum ada pola interaksi G2G, G2C, dan G2B dalam metode pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan danau Limboto.	Tindakan korektif pengendalian Metode Penggunaan Anggaran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo seharusnya diberikan peran yang sama dalam pengendalian metode penggunaan anggaran (G2G), G2C, dan G2B dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di pesisir danau Limboto atau di Kabupaten Gorontalo
3). Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)				
Pola Interaksi dalam Pelaksanaan Kebijakan	1. Interaksi dalam Pelaksanaan Kebijakan	Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan public Menurut Edward III (1980: 1)	Kerjasama Instansi G2G Pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan	Kebijakan public pengelolaan danau Limboto tidak dapat dilakukan secara parsial/sectoral. Untuk meminimalisasi

			Danau Limboto belum terjalin. Sectoral pengelolaan danau Limboto yang menyebabkan kerjasama kreatif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan danau Limboto menunjukkan kesenjangan kepentingan	kesenjangan dalam pengelolaan danau diperlukan kerjasama, (G2G) pusat/daerah, (G2B), (G2C) (B2C), mewujudkan perbaikan danau Limboto.
	2. Interaksi Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan	Merupakan jalinan kerjasama usaha, strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan (Abidin: 2012: 162)	Hubungan kerjasama pemerintah G2G, G2B, G2C, dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan danau Limboto, berjalan dengan kepentingan sendiri-sendiri, belum menunjukkan jalinan kerjasama saling membutuhkan dan menguntungkan dalam pengelolaan danau Limboto.	Hubungan kemitraan actor (G2G), (G2B) (G2C) atau (B2C) merupakan strategi kolaborasi dalam pengelolaan danau Limboto yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain dalam pelaksanaan Kebijakan.
	3. Interaksi Pengendalian Metode Kerja Pengelolaan Danau Limboto	Merupakan bagian terpenting dari proses pengendalian adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan, (dalam Budiyo	Hubungan kerjasama G2G, belum optimal. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini berperan fungsi koordinasi	Bagian terpenting dari proses pengendalian metode kerja pengelolaan danau Limboto dengan melakukan tindakan korektif melalui jalinan

		Amirullah: 2004: 98).	saja, Sektor swasta, hanya berperan sebagai pelaksana teknis, bermitra dengan BWS. Masyarakat belum diberdayakan dalam pengelolaan danau Limboto.	hubungan (G2G), (G2B) (G2C), (B2C)
4). Koodinasi (<i>Coordinating</i>)				
Pola Interaksi dalam Koordinasi Pencapaian Tujuan	1. Interaksi dalam Kesatuan Komando	Merupakan proses menyatukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit atau bagian dari fungsional suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, (Stoner dan Wankel: 1986)	Perasaan untuk bekerjasama, team spirit serta esprit de corps antara pemerintah (pusat dan daerah), swasta serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan danau Limboto belum berjalan dengan baik. Kesatuan usaha actor dalam mengatur tindakan kegiatan pengelolaan danau Limboto belum menunjukkan kesatuan aksi pencapaian tujuan pengelolaan danau Limboto.	Perasaan bekerjasama dalam proses penyatuan tujuan dari unit-unit suatu organisasi yang terpisah dengan <i>team spirit serta esprit de corps</i> mulai dari pemerintah pusat sampai ke Pemerintah daerah/Desa melalui (G2G), (G2B), (G2C), (B2C) merupakan satu kesatuan usaha actor dalam menselaraskan tujuan pencapaian pengelolaan danau Limboto secara efisien di daerah
	2. Interaksi dalam Sinergitas dalam Pencapaian Tujuan	Merupakan proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang dan kelompok tersusun menjadi satu	Kompleksitas pengelolaan danau Limboto ditandai dengan spesialisasi tingkat pembagian kerja	Proses pembagian kerja dari berbagai organisasi/kelompok, sebaiknya disusun menjadi satu kebutuhan yang terintegrasi dalam

		kebutuhan terintegrasi dengan cara seefisien mungkin (Siagian: 1978)	baik pemerintah (pusat dan daerah), swasta serta masyarakat, di setiap unit organisasi. Pengelolaan danau Limboto belum menggambarkan satu irama yang serasi dan terpadu. untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam, harmonis focus pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.	wadah yang strategis serta terintegrasi G2G, G2C, G2B, dan B2C. Spesialisasi kehadiran pemerintahpusat dalam pelaksanaan proyek danau merupakan kompleksitaspengelolaan asset danau Limboto. Perlunya sinergitasdalam pengelolaan danau Limboto
	3. Interaksi dalam Kolaborasi antar dua pihak atau lebih	Merupakan kegiatan bersama oleh dua atau lebih instansi yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai public. (Bardach: 1998: 8)	Pertukaran informasi melalui komunikasi dua arah dalam mewujudkan komunikasi yang efektif belum didukung oleh adanya struktur yang jelas, dan jalur komunikasi yang tepat antara pemerintah (pusat/daerah), swasta dan masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto di daerah.	Kegiatan bersama pertukaran informasi melalui komunikasi efektif dua arah perlu didukung oleh adanya struktur yang jelas, dan jalur (system) komunikasi yang tepat antara pemerintah (pusat/daerah) (G2G), (G2B), (G2C), (B2C), dalam pengelolaan danau Limboto untuk meningkatkan nilai asset public Danau Limboto.

B. Pembahasan Temuan Penelitian

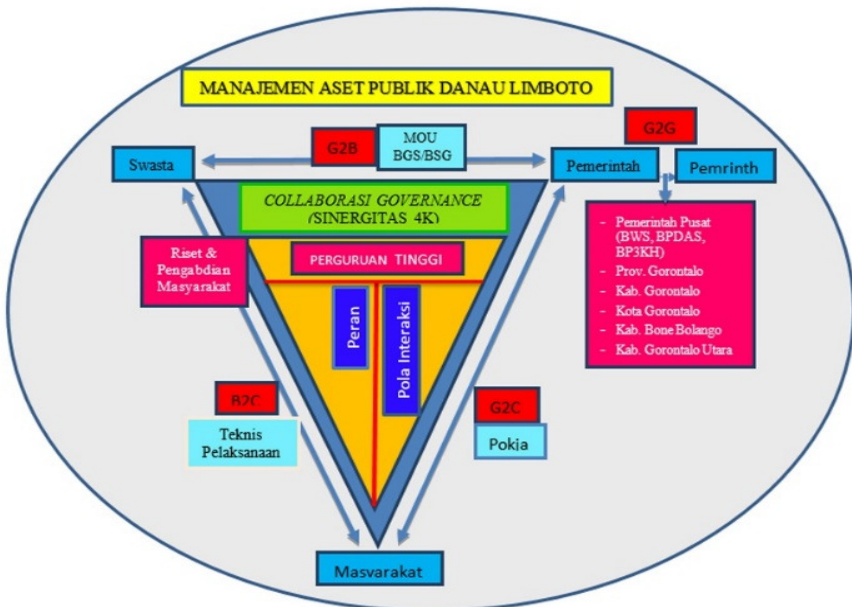
Berdasarkan analisis hasil penelitian tersebut, dalam disertasi ini diurutkan temuan sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Pelaku utama yang berperan dalam pengelolaan danau Limboto adalah *stakeholders* yang terdiri dari Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat. Pelaku utama tersebut belum berkomitmen untuk bersinergi dalam suatu wadah strategis untuk berkolaborasi menyelamatkan danau Limboto.
- 2) Interaksi peran Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto belum terkoordinasi dalam wadah/ wahana strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga mengakibatkan terjadi kesenjangan kepentingan dan fenomena egoisme sektoral pengelolaan danau Limboto.
- 3) Aset danau Limboto memiliki potensi SDA yang memiliki nilai tinggi, yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan aset danau Limboto tergantung pada kolaborasi Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi, yang terintegrasi secara sinergi dalam prinsip manajemen aset.
- 4) Kolaborasi yang terintegrasi dan bersinergi antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (*Government to Government/G2G*), Pemerintah Daerah dengan Swasta (*Government to Business/G2B*), Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community/G2C*), Swasta dengan Masyarakat (*Business*

to Community/B2C) dalam manajemen aset danau Limboto.

Temuan-temuan tersebut, dapat dikonstruksi dalam suatu model pengelolaan aset danau Limboto. Model ini secara implisit dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian dan penyelamatan danau Limboto dari ancaman pendangkalan serta dapat mengurangi kesenjangan kepentingan antar pelaku yang terjalin secara kolaboratif terintegrasi dan sinergitas dalam prinsip manajemen aset, yang dapat mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bingkai nilai-nilai sosial budaya “adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan kitabullah”.

PROTOTIPE MODEL PENGELOLAAN ASET DANAU LIMBOTO, 2018



Proposisi Minor

1. Asset publik danau Limboto dikelola dengan baik tergantung pada sinergitas komitmen peran Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi secara kolaboratif dalam suatu wadah strategis. Artinya, semakin sinergi komitmen peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi dalam suatu wadah strategis, semakin baik pengelolaan danau Limboto.
2. Asset publik danau Limboto dikelola dengan baik tergantung pada integrasi peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi secara kolaboratif yang terkoordinasi, tersinkronisasi, terimplisifikasi dalam suatu wadah strategis

Proposisi Mayor

Keberhasilan pengelolaan danau Limboto, tergantung pada **sinergitas** peran Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara kolaboratif terkoordinasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi dalam wadah strategis menjadi standar emas mewujudkan *good society governance* (GSG) guna meningkatkan nilai tambah investasi daerah (NTID) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan danau Limboto belum optimal. Actor publiktersebut belum berkomitmen secara kolaboratif dan bersinergi yang memungkinkan diterapkannya sistem manajemen aset publik.
2. Pola interaksiactor yakni Pemerintah dengan Pemerintah/G2G belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu wadah strategis, interaksi Pemerintah dengan Swasta/G2B belum terjalin secara kolaboratif, interaksi Pemerintah dengan Masyarakat/G2C belum optimal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, apalagi interaksiSwasta dengan Masyarakat/B2C masih perlu ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan program kerja pengelolaan danau Limboto yang memungkinkan terwujudnya kemandirian (GSG) dan (PAD)dalam sistem manajemen aset publikpengelolaan dan pelestarian serta penyelamatan danau Limboto.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi, berperan aktif dan berinteraksi dalam suatu mekanisme wadah strategis secara kolaboratif untuk dapat menciptakan suatu arah kebijakan publik pengelolaan danau Limboto yang baik dan konsisten.
2. Pemerintah Pusat/Daerah/G2G, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi, sebaiknya bersinergi secara kolaboratif dalam prinsip jalinan: Komitmen, Komunikasi dan Koordinasi serta Konsisten demi penyelamatan aset danau Limboto. Menjadi tantangan terbesar Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penyelamatan Danau

Limboto adalah danau Limboto yang berada di dua wilayah pemerintahan yakni Kabupaten Gorontalo (70%) dan Kota Gorontalo (30%), sementara pemicu proses pendangkalan danau bersumber dari kerusakan hutan di bagian hulu/Bone Bolango, danau menjadi hilir dari 23 Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk dari Kabupaten Gorontalo Utara, pengawasan masalah danau selama ini oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan penanganan pembangunan

infrastruktur danau oleh Balai Wilayah Sungai BWS II Sulawesi, namun belum adanya sinergitas dalam pengelolaan danau Limboto. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sejatinya diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola Danau (sesuai UU No. 32 Tahun 2004) khususnya dalam mengelola keunikan kekayaan asset danau Limboto. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebaiknya mendesak Pemerintah Provinsi, agar pengelolaan danau Limboto menjadi program unggulan kedepan dan prioritas berkelanjutan. Bentuk penyelamatan danau Limboto dari kepunahan adalah pentingnya interaksi multi stakeholder yakni pemerintah (pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara), sektor swasta dan masyarakat serta Perguruan Tinggi seProvinsi Gorontalo) dalam ruang partisipasi dan mekanisme yang jelas. Pemerintah harus lebih terbuka terhadap ide-ide baru yang muncul terutama dari *civil society* untuk dapat memicu terjadinya kualitas hubungan pemerintah dengan masyarakat (G2C), sehingga diharapkan akan terwujud kesepahaman yang lebih besar dan kemauan yang lebih serius antara pemerintah dengan masyarakat untuk bekerja sama.

3. Untuk melestarikan dan menyelamatkan danau Limboto dari ancaman pendangkalan, perlu: (a) tersusun suatu mekanisme perencanaan, penganggaran, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset danau Limboto yang melibatkan para *stakeholders* (Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi) secara kolaboratif; (b) mendorong peran Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi secara kolaboratif dalam wadah strategis untuk memaksimalkan potensi danau Limboto bagi kesejahteraan masyarakat (GSG) dan peningkatan (PAD).
4. Sektor swasta agar dapat bermitra dengan masyarakat (B2C), sebab peran swasta dalam selain harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan

- 48
- memanfaatkan sumber daya yang ada (SDM/SDA) juga berperan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, serta mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, menyediakan kredit bagi pengembangan UKM dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
5. Kepada masyarakat disarankan untuk bersama-sama bertanggungjawab menyelamatkan danau Limboto dari kepunahan. Melalui gerakan cinta lingkungan dengan etika menjaga dan melindungi asset milik Negara. Sebab peran aktif masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto sebagai lambang keberhasilan penyelamatan danau Limboto.

C. Dalil-Dalil

Meskipun lokus dan focus masalah penelitian berada di Kabupaten Gorontalo, namun temuan penelitian ini dapat juga diberlakukan di Tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan proposisi, kesimpulan dan saran di atas, dalil-dalil hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, bekerjasama dalam penyediaan sumber daya (material dan non materiel), yaitu penganggaran dan penyusunan regulasi kebijakan yang memungkinkan keterlibatan pihak swasta, masyarakat dan Perguruan Tinggi secara demokratis dan partisipatif berdasarkan kepercayaan dan visi bersama yang berpotensi meningkatkan kemampuan para pihak untuk mencapai hasil yang baik, hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis sesama pemangku kepentingan (win-win solution) dalam pengelolaan aset publik danau Limboto.
2. Pengelolaan aset danau Limboto secara praktis membutuhkan wadah strategis (Badan Otorita) untuk mengoptimalkan prinsip manajemen aset yang memungkinkan diterapkannya prinsip perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Kemampuan *stakeholders* dalam pengelolaan aset danau Limboto, terwujud dari adanya komitmen, komunikasi, dan koordinasi, dan konsisten yang memungkinkan

terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelamatan dan pelestarian aset publik danau Limboto

Dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan dalam satu rumusan tunggal yang merupakan novelty penelitian ini yaitu:

Keberhasilan pengelolaan danau Limboto, tergantung pada **sinergitas** peran Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara **kolaboratif, terkoordinasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi** dalam wadah strategis menjadi standar emas mewujudkan *good society governance (GSG)* dan meningkatkan nilai tambah investasi daerah (NTID) serta Pendapatan Asli Daerah (**PAD**)

Dengan meminjam istilah “Alignment” dari manajemen yaitu “Sinergisme” (Fred Smith), maka istilah yang digunakan untuk menjelaskan novelty penelitian ini adalah “Sinergitas”. Istilah ini merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Jika dihubungkan dengan temuan penelitian pada manajemen aset publik studi pengelolaan danau Limboto di Kabupaten Gorontalo, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset danau Limboto dapat

dilakukan melalui pendekatan Sinergitas aktor yang terkoordinasi, tersinkronisasi dan tersimplifikasi yakni:

2. **Terkoordinasi** maksudnya proses menyatukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit atau bagian dari fungsional suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan, merupakan proses mengatur agar pembagian kerja dari berbagai kelompok tersusun menjadi satu kebutuhan terintegrasi yang dilakukan bersama oleh dua pihak atau lebih instansi yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai public dalam pengelolaan asset danau Limboto. Artinya komitmen antara Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta dan Masyarakat serta Perguruan Tinggi dalam memadukan peran dan kerjasamanya dalam pengelolaan danau Limboto, akan menghasilkan luaran pengelolaan danau Limboto yang lebih baik dan berkualitas, daripada dikelola secara sectoral atau parsial. Kemitraan yang harmonis dari para pemangku kepentingan (pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat serta perguruan tinggi) untuk mempercepat pencapaian keberhasilan pengelolaan danau Limboto dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Sinergitas akan mudah terjadi apabila seluruh komponen-komponen public yang ada mampu berkomitmen dan berpikir sinergi pada prinsip kebersamaan pandang dan saling menghargai. Sehingga tercipta hubungan saling ketergantungan serta membentuk satu kesatuan fungsional guna mencapai tujuan tertentu. Melalui koordinasi, memungkinkan adanya kesatuan, keterpaduan antar unit atau bagian sehingga tercipta keharmonisan organisasi Sugandha (1991:12). Ada dua konsekuensi utama dalam membangun koordinasi yaitu; (1) suatu unit tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lain; (2) tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan pengelolaan kearah perbaikan danau Limboto. Perpaduan dua pihak atau lebih, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Swasta dan

masyarakat serta Perguruan Tinggi yang terintegrasi melalui G2G, G2B, G2C, maupun B2C dalam pengelolaan danau Limboto. Sinergitas seluruh komponen public yang terintegrasi tersebut akan menentukan keberhasilan pengelolaan asset danau Limboto di masa mendatang. Kemitraan dan kolaborasi yang terjalin akan menjawab operasional teory dalam penelitian ini yakni *collaborasi governance*. Berragam tipe kemitraan dan kolaborasi yang menjadi dasar rujukan peneliti adalah berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesi No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang didalamnya terdapat 5 (lima) metode pemanfaatan BUMN/D yaitu; 1) metode sewa, 2) pinjam pakai, 3) BGS-BSG, 4) kerjasama pemanfaatan, 5) kerjasama penyediaan infrastruktur. Metode pengelolaan asset yang diusulkan dalam pengelolaan dananu Limboto adalah metode bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG) dan kerjasama pemanfaatan. Keunggulan model bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG) yang menonjol adalah keamanan asset terjaga. Sebagaimana terdapat pada pasal 36 ayat (1) bahwa jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan sebuah konsekuensi. Keuntungan lainnya dari metode BGS/BSG dimana 10% hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah (pasal 36 ayat 3), dan kewajiban memelihara objek BGS/BSG dan dilarang menjaminkan, menggadaikan Kausal ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan bangunan diawal masa pembangunan. Jika pengelolaan danau Limboto untuk pengembangan kawasan wisata danau atau pemanfaatan enceng gondok dan sedimen, maka bangunan tersebut dapat diperuntukkan (Badan Otorita Danau) yang berfungsi menunjang kegiatan sinergitas dan pengembangan pengelolaan asset danau Limboto. Termasuk program pemberdayaan masyarakat pesisir danau, *public entrepreneurship* dan sebagainya demi mewujudkan kemandirian masyarakat.

3. **Tersinkronisasi** maksudnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing semua unsur yang terkait dalam pengelolaan danau Limboto wajib menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi. Komunikasi dianggap sebagai mekanisme untuk menciptakan koordinasi pengelolaan danau Limboto yang lebih baik. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, perlu ada struktur dan jalur komunikasi yang tepat serta tata kerja yang sempurna. Sebagai syarat bagi kemajuan organisasi harus ditunjang oleh sistem komunikasi efektif. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang telah diciptakan. Untuk itulah maka perlu diciptakan suasana dan struktur organisasi dalam suatu wadah yang strategis, memungkinkan koordinasi dan komunikasi terjalin dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi penyelamatan danau Limboto. Pencapaian kinerja tata kelola danau Limboto (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan arah kebijakan dan koordinasi) pengelolaan danau Limboto sebaiknya dilakukan secara bersama-sama Pemerintah Pusat/Daerah, swasta dan masyarakat secara sistematis di daerah dalam satu wadah strategis. Segala resiko serta pengeluaran pengelolaan aset khususnya penganggaran APBN/APBD ataupun terkait siklus hidup asset menjadi tanggungjawab strategis bersama.
4. **Tersimplifikasi** maksudnya perlunya penyederhanaan model dalam pengelolaan danau Limboto yang begitu kompleks ini. Komitmen actor

public yang konsisten, semangat bekerjasama dalam pengelolaan danau Limboto. Konsisten yang berarti istiqomah dalam melaksanakan tugas Negara dengan niat benar-benar ikhlas dan jujur. Kebaruan ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai budaya local daerah Gorontalo melalui falsafah “adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah” yang artinya setiap aktivitas kita harus berdasarkan atas tuntutan dan syariat agama islam. Sangatlah diharapkan falsafah ini menjadi penggerak roda pembangunan di Gorontalo khususnya dalam pengelolaan danau Limboto.

D. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil kajian dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akdemis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap 3 hal yaitu:

1. Implikasi Akademis terhadap Konsep David Osbone dan Ted Gaebler

Implikasi hasil penelitian ini meneguhkan pandangan David Osbone dan Ted Gaebler tentang *Reinventing Government* dan *Banishing Bureaucracy (New Public Management/NPM)*. Buku tersebut menguraikan proses privatisasi penyediaan layanan publik yang di sediakan oleh pemerintah dan *performance budgeting* (Osborne dan Gaebler, 1999).Dimana manajemen asset pengelolaan danau Limboto ini ditemukan dalam sebuah proses Sinergitas actor yang terkoordinasi, tersinkronisasi, dan tersimplifikasi dalam suatu wadah strategis. Pemikiran ini seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang menurut Haedar Akib menandai era baru reformasi atau transformasi organisasi modern saat ini.

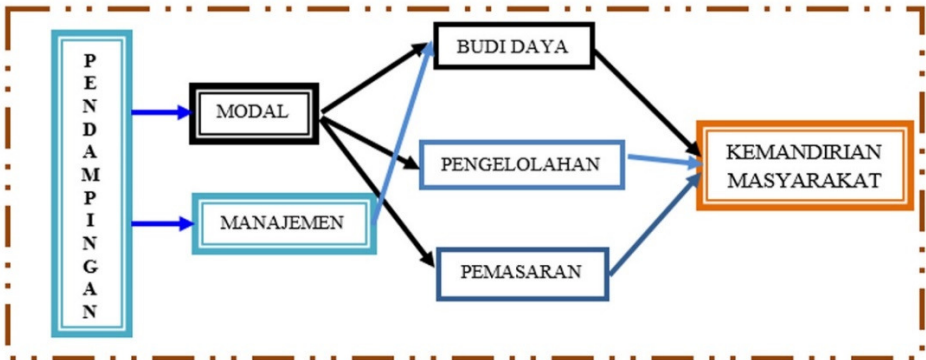
2. Implikasi Praktis sebagai Kontribusi Pemikirankepada Pemerintah Daerah

Kontribusi pemikiran baru kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam merevitalisasi tugas pokok, fungsi dan peran aktor pada program pendampingan kelompok pemberdayaan masyarakat mandiri di pesisir danau

(Kube Tunas Mandiri), sekaligus sebagai upaya nyata membangun kreativitas dan inovasi warga masyarakat pesisir danau menurut perspektif public enterpreurship di Indonesia.

Program pendampingan KUBE TUNAS MANDIRI dalam mengelola Enceng Gondok menjadi pupuk organik di Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

**Pendampingan Kelompok Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Biru
Kabupaten Gorontalo, 2018**










PENDAMPINGAN KELOMPOK

**Budidaya Enceng Gondok dalam
Membangun Kemandirian Masyarakat
dan Penyelamatan Danau Limboto.**

Trisusanti Lamangida

**Program Doktor Ilmu Administrasi Publik
Universitas Negeri Makasar
2018**

Supported by:





Hutadaa, 01 Mei 2018

Temuan penelitian menggambarkan bahwa begitu besarnya ketergantungan masyarakat pada hasil air tawar danau Limboto ini. Ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem yang terlarang ini mendesak peneliti untuk melakukan pendampingan (Edukasi) bagi masyarakat pesisir danau Limboto. Memfasilitasi masyarakat dalam upaya mengelola enceng gondok menjadi produk bernilai kearifan local (pupuk organik), bermaksud menghipnotis masyarakat agar tidak tertarik lagi untuk melakukan pembiakan enceng gondok di danau dengan segala aksi perilaku masyarakat yang sengaja mengakibatkan pendangkalan dan kerusakan danau Limboto.

Lemahnya pendampingan dan keseriusan dari pihak berkompeten dalam program pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan program pemberdayaan melalui pendampingan seperti ini akan menjadi langkah awal sekaligus mewujudkan ending dari penelitian ini adalah menciptakan kemandirian masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan pendampingan jangka panjang yang diinginkan adalah membangun Pusat Pemberdayaan Masyarakat “PABRIK ALA ENCENG GONDOK” di pesisir danau Limboto, dalam wadah KUBE TUNAS MANDIRI. Membantu masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Luaran yang telah dicapai sekarang ini;

1. Kube ini telah terdaftar “surat pencatatan ciptaan/HAKI” pada Kementrian Hukum dan Ham dengan No. EC000201845006.
2. Berhasil melakukan fermentasi enceng gondok untuk menjadi pupuk organik, dan menunggu panen hasil fermentasi tersebut pada pertengahan bulan Desember 2018. Semoga hasilnya memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2004. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan praktis), Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Akib, H. (2005). Kreativitas Dalam Organisasi. Universitas Indonesia Jakarta
- Amirullah dan Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Cetakan Kedua. Graha Ilmu.
- Budiati. 2012. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI
- Brown, Kerry, Marien Laue, Robyn Keast, Nateque Mahmood, Anna Wiewiora, Ms Jane Montgomery. 2012. Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset Yang Strategis, Australian Asset Management Collaborative Group (AAMCoG): Research Centre, Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) for assistance with the translation of this Guide.
- Dako, Rahman. 2016. Pendekatan Bioregionalism Dalam Upaya Penyelamatan Danau Limboto, sebuah masukan untuk kertas Konsep JAPESDA Bagi Penyusunan Peraturan Daerah Penyelamatan Danau Limboto Provinsi Gorontalo
- Denhardt, Robert B. and Denhardt, Janet V. 2003. The New Public Service, Serving Not Steering. England: M.E Sharpe
- Dwiyanto, A. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Cet. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- . 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance", dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kapucu, Naim, Farhod Yulashev, and Erlan Bakiev. 2009. Collaborative Public Management and Collaborative Governance: Conceptual Similarities and Differences:

- EJEP2. European Journal Of Economic and Political Studies
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Cides
- _____. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Edisi 2, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gava Media.
- Kooiman, Jan (ed). 1993. *Modern Governance: New Government Society Interactions*, London: Sage Publications

55

- Lembaga Administrasi Negara (LAN-BPKP). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LANRI
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet.Kedelapanbelas, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Miles, MB dan Hubberman, AM., dan Saldana, J., 2014. *Qualitative data Analisis: A Methods Sourcesbook Third Edition* (Internet). Sage Publication London. Diakses Melalui: <http://www.emmaburnett.wordpress.com/2016/12/28/qualitative-analysis-data-condensation-aka-reduction/pada> tanggal 24 Februari 2018. Jam 10.20 Wita.
- Nychhtyon, Badan Lal. 2006. *Paspoct and Constraints o Public Private Partnership For Urban Waste Management*. Nepal; Economic Policy Network.
- Nugroho. Rian., 2009. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Hadari dan M. Martini.2006. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Jogyaakarta: Gadjah Mada University
- Osborne, David dan Ted Gabler. 1999. "Reinventing Government (How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector)". Addison Wesley: Publishing Company, Inc.

- Osboner, David dan Peter Plastrik, 2000, Memangkas Birokrasi (penerjemah : Abdul Rosyid), Jakarta, PPM
- Pamudji, S. 1995. Pengendalian Manajemen, Jakarta:Gunung Agung
- Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Penerbit Pustaka Arif. Jakarata
- Sugiyama. 2013. Manajemen Aset. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Siagian, S.P. 2001. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, Cetakan Kedua, Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Siregar, Doli D, 2004, Manajemen Aset. Jakarta; Gramedia
- Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan Pengembangan dalam konteks Organisasi Publik, Edisi Kedua, Cet.Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Terry, George, R. 2008. Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2008. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- .2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Edisi Pertama. Cet.ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- 56 DP (UNESCO).1999. Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge, Science for the Twenty-First Century, Budapest, Hungary, June 26 – July 1, 1999 pada <http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration/e.htm>
- Winardi. 2001. Kepemimpinan dalam Manajemen. Edisi baru. Jakarta:Rineke Cipta
- Widjaja, A.W, dan Wahab, M.Arsyik. 2004. Komunikasi Administrasi, Organisasi dan manajemen Dalam Pembangunan, Jakarta: Bina Aksara
- Witter.E., Bitter.J. and Kasprzak.C. 2003. Asset Management and City Government, Proceeding of the 2003 Mid-Continent Transportation Research Symposium, Iowa State University
- Wursanto, Ignatius. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Edisi II, cetakan kedua, Yogyakarta: Andi Offset
- Journals
- Akib, H. (2011). Mencermati Heuristik Transformasi Organisasi: mereaktualisasi Perilaku Kreatif Manusia

- Melalui pendekatan Knowledge management. Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia, 40(3), 225–244.
- Akib Haedar. 2013. Implementasi Kebijakan, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Nomor I/Februari/2010/. ISSN: 2086-6364
- Hasim, 2012. Desain Kebijakan Pengelolaan Terpadu Dan Berkelanjutan pada Danau Limboto Provinsi Gorontalo. Jurnal IPB Bogor Agricultural University (Husain, Lamangida, Akib: 2018) *Public Entreprenurship Perspektif in Management of the Limboto Lake, Indonesia.*
Manuscrip Number: Allied Journals-18-1360.
- Lamangida, T. (2017). Actors' Role In Public Asset Management A Study of Limboto Lake in Gorontalo, Indonesia. Proceddings Icas Indonesia, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icas-17/25886487>
- Rayudaswati Budi, Haedar Akib, Jasruddin & Gufran Darma Dirawan, Public Information Management Services In South Sulawesi, I J A B E R, Vol. 13, No. 4, (2015): 1803-1813.
- Perundang-Undangan:
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Danau Limboto.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Menpan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2009-2011

6. S3. Universitas Negeri Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2015 sampai dengan sekarang

D. Pengalaman Pekerjaan/Jabatan

- 58
1. Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Gorontalo dari Tahun 2009-2012.
 2. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DPD II Golkar Kota Gorontalo, Tahun 2012-2017.
 3. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, FEIS-UMG Tahun 2012-2014
 4. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UMG, Tahun 2014-2016

E. Pengalaman Penelitian dan Publikasi 5 (Lima) Tahun terakhir:

1. Kajian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibiayai Dikti pada Hibah Dosen Pemula Tahun 2013. (Publikasi Akademika: ISSN: 2301-6248)
2. Analisis Pendayagunaan Zakat bagi Usaha Produktif Masyarakat Miskin di Kota Gorontalo, kembali dibiayai Dikti Tahun 2014. (Administrare Makassar. ISSN No. 2088-9267)
3. Efektivitas Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Mandiri, Tahun 2015 (jurnal Jurnal Ilmu Administrasi Publik ISSN No 2301-573X)
4. *Portrait Of Motor Tricycle As Sustainable Public Transportation, di Biayai oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan di presentasikan pada seminar Internasional (ICTIS) Padang, di publikasikan di jurnal terindeks cros creft ITP, Tahun 2016 (Proceeding ITP PREES-ISBN-978-602-705-70-4-3)*
5. Peranan Aparat Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi yang Efektif di Kecamatan Kabila

Kabupaten Bone Bolango. Mandiri (Jurnal Jurnal Administrasi Negara ISSN No. 2301-573X)

6. Fungsi Kepemimpinan dalam Pencapaian Tujuan Organisasi, Mandiri, (Jurnal Jurnal Ekonomi Pembangunan ISSN No; 2301-5726)
7. Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Mandiri Jurnal: (JAKPP ISSN: 2460-6162. ONLINE ISSN: 2527-6476) Website: <http://www.unhas.ac.id/fisip>
8. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan terhadap Peningkatan Kinerja Kepala Desa (Jurnal AKADEMIKA ISSN: 2301-6248).
9. Potret Masyarakat dan Upaya merestorasi Danau Limboto (Jurnal Nas UNM, ISBN:978-602-5554-05-6, dipresentasikan di UNM Makassar)

59

10. Peran Aktor dalam Pengelolaan Danau Limboto (Jurnal Internasional Thomson (ICAS) (www.atlantis.-press.com))
11. *Actor Interaction patterns in management of public assets in Limboto Lake* (dipresentasikan di ITM-Johor Kuala Lumpur, dipublikasikan pada www.msocalsciences.com Atau <https://goo.gl/n7j5gG>)
12. *Management of Public Assets Study Management Of Lake Limboto Gorontalo District.*
Doi>: 10.9790/0837-2308059299. Cross ref.
<http://iosrjournals.org/> *iosr-*
jhss/pages/23(8)Version-5.html
13. *Limboto Lake Asset Management Patnership and Collaboration Based*
The Manuscript URL:
<https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/author/submission/4843>
14. *Public Entreprenurship Perspektif in Management of the Limboto Lake, Indonesia.*
Manuscrip Number: Allied Journals-18-1360.

F. Pengalaman Presentasi Hasil Penelitian

1. *Portrait Of Motor Tricycle As Sustainable Public Transportation*, di presentasikan pada seminar Internasional (ICTIS) Padang, Institut Teknologi Padang Tahun 2016
2. Potret Masyarakat dan Upaya merestorasi Danau Limboto, pada seminar Nasional pendidikan dipresentasikan di UNM Makassar Tahun 2017
3. Peran Aktor dalam Pengelolaan Danau Limboto, pada Internasional Conference on Administrative Science (ICAS) 2017 20-21 November pada Universitas Hasanuddin Makassar.
4. *Actor Interaction patterns in management of public assets in Limboto Lake* dipresentasikan pada The International Conference on Sosial Science & Humanities pada Institut Teknologi Malaysia -Johor Kuala Lumpur 2018.

G. Pengalaman Pengabdian 5 (Lima) Tahun terakhir

1. Penggagas Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi secara gratis kepada masyarakat Miskin di Kota Gorontalo, Tahun 2012.
- 60 2. Mendirikan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “KARYA MANDIRI” berbadan Hukum (NOTARIS), Tahun 2013.
3. Instruktur pada Lembaga Pelatihan Keterampilan (BLK) Provinsi Gorontalo, Tahun 2013-2014,
4. Fasilitator sekaligus Pendamping Kelompok Usaha Bersama Masyarakat (KUBE TUNAS MANDIRI) Pesisir Danau Limboto terkait Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik, Tahun 2018.

H. Pengalaman menulis di surat kabar

1. Menulis artikel berjudul “Makna Pembangunan adalah Perubahan” di terbitkan di Harian Gorontalo pada tanggal 12 desember 2015
2. Menulis artikel “Menjadi Pemimpin yang dirindukan” di terbitkan di Harian Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2016
3. Menulis artikel “Memilih Pemimpin Masa Depan” di

terbitkan di Harian Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2017.

4. Menulis artikel “Memperkenalkan asset Danau Limboto pada Dunia” di terbitkan di Radar Gorontalo pada tanggal 21 November 2017
5. Menulis artikel “Peran Aktor Publik wujud pilar penyelamatan Danau Limboto” di terbitkan di Radar Gorontalo pada tanggal 27 Desember 2017

I. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir

1. Sebagai Ketua Program Studi Terbaik pada Milad UMG Ke III, Tahun 2013.
2. Mendapat Penghargaan Sebagai Dosen Profesional (SERDOS) oleh Kementrian Ristek Dikti, pada 11 Mei Tahun 2017

J. HAKI

1. Management of Public Assets Study Management Of Lake Limboto Gorontalo District. Diumumkan pada tanggal 22 November 2017 di Gorontalo. Nomor Pencatatan: 000116554
2. Fasilitator dan Pendamping Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KUBE TUNAS MANDIRI) di Desa Hutadaa Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Diumumkan tanggal 01 Mei 2018 di Limboto Kabupaten Gorontalo. Nomor Pencatatan: 000116804.